

**KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK)
DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR**
(Suatu Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan pada SDN Klojen II Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

**Disusun oleh:
NURUL KHOIRIYAH
0210310071-31**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
MALANG
2006**

ABSTRAKSI

**Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dalam Rangka
Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar
(Suatu Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Pada SDN Klojen II Malang)
(Nurul Khoiriyah, 2006: 130)**

Proses implementasi kebijakan seringkali tidak dapat lepas dari adanya penyimpangan datau paling tidak menemui hambatan yang menyebabkan kebijakan tidak dapat terimplementasi sempurna. Analisis implementasi kebijakan memegang peran penting dalam mengidentifikasikan aspek-aspek sosial, politik dan ekonomi dalam lingkungan kebijakan itu diimplementasikan. Terlebih lagi pada kondisi negara berkembang dimana kebijakan merupakan alat bagi pelaksanaan pembangunan, tidak terkecuali pembangunan dunia pendidikan.

Bergulirnya globalisasi telah mempengaruhi perubahan dalam dunia pendidikan, baik dunia pendidikan internasional maupun dunia pendidikan nasional. Menurut pendapat Dave Hill serta H.A.R Tilaar perubahan dunia pendidikan seringkali dipengaruhi oleh aspek-aspek politik, dimana pada dewasa ini yang tampak adalah kecenderungan neoliberalisme yang mengarah pada komersialisasi pendidikan. Perubahan sistem pendidikan nasional dengan penetapan Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dipandang sebagai jawaban atas tuntutan peningkatan mutu pendidikan nasional serta memenuhi tantangan persaingan global.

SDN Klojen II Malang merupakan lembaga pendidikan yang sejak tahun ajaran 2004-2005 telah mengimplementasikan kebijakan KBK pada sistem pembelajarannya serta bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan lulusannya. KBK merupakan model belajar yang mengutamakan penguasaan kompetensi bagi siswa setiap jenjang pendidikan dengan menggunakan model belajar berbasis holistik yaitu memandang siswa sebagai manusia seutuhnya yang memiliki kelebihan dan kekurangan, setiap siswa memiliki kemampuan menerima pelajaran yang berbeda-beda. Oleh karena itulah sistem belajar KBK lebih berorientasi pada kegiatan dan pengalaman praktis serta membutuhkan ketersediaan sumber daya pendukung yang cukup besar.

Implementasi kebijakan KBK pada SDN Klojen II Malang menunjukkan bahwa sejak KBK mulai dilaksanakan telah menaikkan anggaran operasional sekolah. Kebutuhan akan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar sangat dibutuhkan. Fasilitas yang dimiliki sebelumnya belum mampu menjawab tuntutan belajar KBK. Bahkan sumber daya guru dan tenaga karyawan yang tersedia dianggap tidak memenuhi kebutuhan belajar KBK. Kebutuhan anggaran pendapatan bagi

pelaksanaan operasional sekolah telah dibantu oleh kebijakan pemerintah melalui pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun bantuan ini dirasakan belum mencukupi kebutuhan anggaran pendapatan sekolah. Untuk itulah bantuan dan peran serta orang tua siswa lebih ditingkatkan lagi, yaitu melalui penarikan uang sumbangan pembangunan dari siswa baru, iuran siswa setiap bulan, serta melalui pembentukan paguyuban kelas dan dewan sekolah.

Upaya peningkatan mutu pendidikan di SDN Klojen II Malang telah terdefinisi dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Sayangnya kebijakan peningkatan mutu tersebut hanya pada peningkatan mutu sumber daya manusia belum menyentuh pada peningkatan fasilitas belajarnya.

Analisis implementasi kebijakan KBK pada SDN Klojen II Malang menunjukkan bahwa selama pemerintah selaku perumus kebijakan belum mampu bertindak sebagai fasilitator, yang dalam kerangka implementasi kebijakan KBK lebih pada penyediaan bantuan dana dan fasilitas belajar, maka implementasi KBK akan mengarah pada komersialisasi pendidikan.



DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kontribusi Penelitian	12
BAB II. KERANGKA TEORI	
A. Konsep Dasar Kebijakan dan Kebijakan Publik	14
B. Kurikulum Berbasis Kompetensi	17
1. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	17
2. Relevansi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di Indonesia ..	24
C. Model Implementasi Kebijakan	40
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	56
B. Fokus Penelitian	57
C. Lokasi dan Situs Penelitian	59
D. Jenis dan Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Instrumen Penelitian	62
G. Analisa Data	62
BAB IV. PENYAJIAN DATA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
1. Kota Malang sebagai Kota Pendidikan	66
2. Gambaran Umum SDN Klojen II Malang	71
B. Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di SDN Klojen II Malang	75
1. Prosedur Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Instansi terkait	75

a. Prosedur Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada Dinas Pendidikan Kota Malang	75
b. Prosedur Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada SDN Klojen II Malang	77
2. Kesiapan SDN Klojen II Malang dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi	79
a. Potensi Sumber Daya Guru dan Karyawan SDN Klojen II Malang	79
b. Potensi Sumber Daya Siswa SDN Klojen II Malang	81
c. Potensi Fasilitas Pendidikan SDN Klojen II Malang	84
d. Suber Pendanaan Pendidikan SDN Klojen II Malang	88
e. Dukungan Orang Tua Siswa	92
3. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di SDN Klojen II Malang ...	98
a. Pembaharuan Sistem Kegiatan Belajar Mengajar	98
b. Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Pendidikan	101
c. Peningkatan Mutu Siswa	102
4. Kendala yang Dihadapi oleh SDN Klojen II Malang dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	106

BAB V. ANALISIS

A. Model Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	108
1. Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan	108
2. Kemampuan Kebijakan untuk Menstrukturkan Proses Implementasi	110
3. Variabel di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi	112
4. Proses Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada SDN Klojen II Malang	113
B. Dampak Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	122

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	127
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan Peran Negara dalam Pendidikan	26
Tabel 2. Perbedaan Kurikulum 1994 dengan Kurikulum 2004	38
Tabel 3. Jumlah Sekolah Dasar di Kota Malang	67
Tabel 4. Jumlah Sekolah Dasar Berdasarkan Wilayah Kecamatan	68
Tabel 5. Jumlah Siswa Sekolah Dasar Kota Malang	69
Tabel 6. Data Prestasi Siswa dan Guru Kota Malang Tahun 2005	70
Tabel 7. Sarana Belajar di SDN Klojen II Malang	73
Tabel 8. Regenerasi Kepala SDN Klojen II Malang	74
Tabel 9. Pendidikan Terakhir Guru dan Pegawai SDN Klojen II Malang	80
Tabel 10. Jumlah Peserta Didik SDN Klojen II Malang	81
Tabel 11. Data Prestasi Siswa SDN Klojen II Malang	83
Tabel 12. Sarana Pendukung Pendidikan SDN Klojen II Malang	85
Tabel 13. Koleksi Buku Perpustakaan	87
Tabel 14. Tingkat Kemampuan Ekonomi Siswa	91
Tabel 15. Tingkat Pendidikan Orang Tua Siswa Menurut Ijazah Terakhir	93
Tabel 16. Pekerjaan Orang Tua Siswa	95
Tabel 17. Anggaran Peningkatan Mutu KBM SDN Klojen II Malang Tahun 2004 dan 2005	104
Tabel 18. Rekapitulasi Iuran Rutin dan RAPBS SDN Klojen II Malang	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Variabel Proses Implementasi Kebijakan	45
Gambar 2. Model Interaktif Analisa Data	65

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan wujud eksistensi suatu pemerintahan yang melayani masyarakat serta merupakan sarana pencapaian tujuan negara. Melalui kebijakan yang dikeluarkan, masyarakat akan tahu kemana arah pembangunan serta langkah pemerintah untuk mewujudkan cita-cita yang telah dimandatkan kepada mereka. Namun dalam proses perumusan serta implementasi suatu kebijakan seringkali terdapat kelemahan-kelemahan yang menjadi faktor penghambat kebijakan itu mencapai tujuannya. Apalagi dalam proses implementasi, dimana dalam perjalanannya di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial atau yang disebut sebagai isu-isu sosial sehingga implementor diharapkan mampu mengklarifikasikan pemikiran secara mendalam untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat. Meskipun pada kenyataannya dalam proses implementasi kebijakan permasalahan masih seringkali muncul. Oleh karena itulah diperlukan suatu analisis sebagai alat untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.

Piranti analisis yang dimaksud di atas adalah analisis sosial atau analisis kebijakan. Melalui analisis kebijakan akan diketahui isu-isu apa yang ada dalam masyarakat yang dapat mendukung ataupun menghambat implementasi suatu kebijakan publik. Analisis kebijakan merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk

mengkaji proses kebijakan. Oleh para ilmuwan atau pakar politik, analisis kebijakan ditampilkan secara tipikal dimana suatu kebijakan diadopsi sebagai efek dari peristiwa-peristiwa politik. Jadi analisis dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh fenomena-fenomena serta isu-isu sosial berpengaruh terhadap munculnya suatu kebijakan publik. Sehingga kegiatan analisis kebijakan sangat memerlukan pertimbangan konteks sosial, politik, dan ekonomi dimana masalah kebijakan itu ditangani, khususnya yang mencoba mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan besar seputar peran negara dan distribusi kekuasaan diantara kelompok-kelompok sosial harus mencermati kehidupan politik sehari-hari sebagai pangkal tolak berpikir. (Solichin Abdul Wahab, 1999:83)

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa analisis kebijakan memegang peranan penting agar suatu kebijakan terumuskan dengan tepat. Peran analisis kebijakan semakin besar pada negara-negara berkembang dimana masyarakatnya merupakan transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, sehingga belum mempunyai konsep yang jelas dan tetap mengenai model kebijakannya, termasuk Indonesia. Peran penting analisis kebijakan di Indonesia semakin penting keberadaannya jika mengingat kebijakan pemerintah yang masih bersifat reaktif. Dimana suatu kebijakan diterbitkan sesudah terjadi peristiwa yang mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan publik. Namun bagaimanapun

sifatnya, kebijakan dikeluarkan untuk mendukung pembangunan, terutama di Indonesia.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional adalah seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, termasuk kebutuhan pendidikan. Sehingga tingkat keberhasilan dunia pendidikan dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional dapat digunakan sebagai parameter keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini jugalah yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengadakan perubahan dan menata kembali sistem pendidikan nasional yang selama ini dianggap belum menunjukkan hasil yang memuaskan terutama untuk menyongsong era globalisasi. Pembaharuan pendidikan di Indonesia perlu terus dilakukan untuk mencapai dunia pendidikan yang adaptif terhadap perubahan jaman.

Seiring dengan rencana perubahan pendidikan nasional tersebut, maka pada tanggal 2 Mei 2002 Menteri pendidikan nasional, Abdul Malik Fadjar, mencanangkan Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan yang dilengkapi dengan menetapkan dua kebijakan pokok mengenai pendidikan nasional. Pertama, hal yang menyangkut efisiensi pengelolaan pendidikan, pemerintah menetapkan Manajemen Berbasis Sekolah. Kedua, untuk lebih memacu akselerasi peningkatan mutu, pemerintah telah merancang Kurikulum Berbasis Kompetensi sebagai sebuah konsep kurikulum yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam

rangka meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat, industri dan pemerintah dalam membentuk pribadi peserta didik.

Kedua kebijakan tersebut merupakan keputusan penting bagi awal perubahan dunia pendidikan Indonesia. Namun kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), merupakan yang paling erat kaitannya dengan usaha menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Mengingat bahwa kurikulum merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan pendidikan maka penelitian akan lebih difokuskan pada pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai upaya merealisasikan tujuan perubahan dunia pendidikan.

Penyempurnaan kurikulum pendidikan menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), merupakan salah satu semangat dari bergulirnya reformasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, sistem pendidikan Indonesia juga memasuki babak baru dengan adanya otonomi bidang pendidikan. Berkaitan dengan hal itu maka Sidi dalam Mulyasa (2002:6) menyebutkan bahwa terdapat empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang perlu direkonstruksi, yaitu yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan pemerataan pelayanan pendidikan. Selanjutnya Mulyasa (2004:8) mengungkapkan bahwa agar lulusan pendidikan nasional memiliki keunggulan

kompetitif dan komparatif sesuai standar mutu nasional dan internasional, maka pemerintah perlu melakukan berbagai pembaharuan pendidikan nasional.

Keseriusan pemerintah untuk mengadakan pembaharuan pendidikan nasional dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang disahkan oleh DPR pada 11 Juni 2003, yang mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) baru diterapkan pada tahun pelajaran 2004/2005, sehingga juga dikenal sebagai “Kurikulum 2004”. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), mulai tingkat dasar sampai menengah, dilaksanakan secara bertahap dan menggunakan *mini piloting* terlebih dahulu sebelum diterapkan secara nasional. Uji coba ini dilaksanakan pada sejumlah SD, SLTP, dan SMU di Propinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur pada tahun 2001 sampai 2003. Pada tahun 2004, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai kurikulum 2004, mulai diterapkan secara luas di seluruh propinsi.

Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menggunakan penerapan model “Pendidikan Holistik Berbasis Karakter” yang ditujukan untuk mengembangkan dimensi manusia, yang meliputi aspek akademik (kognitif), emosi, sosial, spiritual, motorik dan kreativitas. **(Suara Pembaharuan, 9 Juni 2005)**

Dengan kata lain model pembelajaran ini didasari oleh pemikiran bahwa bakat dan kemampuan peserta didik pada tiap jenjang dalam tiap satuan pendidikan berbeda-beda sehingga diperlukan suatu kurikulum yang memungkinkan setiap peserta didik memiliki kompetensi dasar sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing, sehingga nantinya muncul karakter, ciri khas dan keahlian tertentu dari setiap siswa.

Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, menyebutkan bahwa:

Kurikulum Berbasis Kompetensi dikembangkan untuk memberikan ketrampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakpastian dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Dimana dasar dari pelaksanaannya mengacu pada empat pilar pendidikan universal, yaitu belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar menjadi diri sendiri dan belajar hidup dalam kebersamaan. (Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, 2002)

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan usaha penyempurnaan terhadap kurikulum pendidikan sebelumnya. Sejarah pendidikan Indonesia telah mencatat beberapa kurikulum yang pernah diterapkan dalam pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan yang pernah diterapkan antara lain; Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, dan Kurikulum 1984 yang berbasis materi (*Content-based Curriculum*), Kurikulum 1994 yang berbasis pencapaian tujuan (*Objective-based Curriculum*), dan yang terakhir Kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi (*Competency-based Curriculum*). Secara khusus dapat dikatakan Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan penyempurna dari kurikulum 1994 yang dirasakan belum mampu menjawab tantangan sesuai dengan perkembangan jaman.

Hingga saat ini kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) telah berjalan hampir dua tahun sejak mulai diterapkan pada tahun 2004 lalu. Meskipun sebelumnya pemerintah telah mengadakan sosialisasi terlebih dahulu mengenai sistem pembelajaran ini, namun pelaksanaan di lapangan menunjukkan masih banyaknya kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah mengenai sumber daya guru. Fakta menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia masih jauh dari memadai untuk melakukan perubahan yang sifatnya mendasar seperti kurikulum berbasis kompetensi ini.. Menurut data Depdiknas menunjukkan fakta bahwa guru yang layak mengajar hanya 50,7% untuk jenjang SD, 69,1% untuk jenjang SMP, dan 67,1% untuk jenjang SMA. **(Kompas, 4 Februari 2006)**

Masalah lain yang mungkin timbul dari penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ini adalah tingginya biaya operasional sekolah untuk menerapkan konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Standar kurikulum yang mengutamakan pemberian pengalaman pada siswa dalam memahami suatu ilmu, menuntut sekolah dapat menyediakan sarana belajar yang cukup besar. Hal ini memberi kesempatan sekolah untuk memutuskan menarik biaya yang besar dari para siswa dengan dalih untuk pelaksanaan program sekolah yang mengakibatkan terjadi komersialisasi sekolah. Bagi orang tua yang memiliki dana pendidikan yang cukup besar, tentu akan memasukkan anaknya ke sekolah yang terbaik, dengan alasan kualitas sekolah adalah prioritas utama, meski dengan biaya yang besar. Sedangkan

orang tua dengan dana terbatas akan menghindari sekolah-sekolah dengan kewajiban biaya yang besar, dan kualitas sekolah menjadi prioritas kedua.

Komersialisasi sekolah juga memberikan keuntungan tersendiri bagi pihak sekolah. Sekolah-sekolah yang memiliki siswa dengan latar belakang keluarga kaya akan mampu mengembangkan program-program pembelajaran lebih baik sehingga mampu menjadi sekolah terbaik. Sedangkan sekolah-sekolah yang mempunyai keterbatasan sumber dana, karena kurangnya dukungan dari orang tua siswa, mengalami kesulitan untuk mengembangkan program pembelajarannya. Kemungkinan tersebut dia atas dapat timbul karena adanya otonomi sekolah yang merupakan ciri dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dimana sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan proses pembelajaran serta mengutamakan swadaya sekolah. Sehingga tidak mengherankan jika nantinya akan timbul kesenjangan pendidikan, yang diakibatkan adanya ketidakadilan dalam distribusi pendidikan.

Dampak dari kebijakan pendidikan seperti yang digambarkan di atas merupakan satu peringatan penting bagi para implementor kebijakan, bahwa otonomi sekolah dalam mengimplementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dapat berakibat pada berkembangnya ideologi neo-liberalisme dalam dunia pendidikan. Neo-liberalisme merupakan pandangan mengenai diperlukannya campur tangan pemerintah dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip liberal yaitu kepentingan dan kebebasan individu. Ideologi ini muncul

dengan harapan dapat mengurangi tingkat kesenjangan sosial akibat liberalisme. Namun mengingat besarnya kepentingan politik yang sering kali mempengaruhi tindakan pemerintah, tidak mustahil jika neo-liberalisme justru memperbesar ruang bagi berkembangnya kepentingan-kepentingan yang tersembunyi, termasuk dalam dunia pendidikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa besarnya tuntutan globalisasi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan sosial masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah pun tidak bisa lepas dari usaha untuk menyambut bergulirnya era persaingan terbuka. Hal inilah yang memungkinkan peran pemerintah, dalam pandangan neo-liberal, bergeser menjadi lebih memperbesar ruang perkembangan kapitalisme, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dimana sistem pendidikan tidak lagi sebagai suatu identitas bangsa namun lebih pada usaha menciptakan aset untuk menghadapi persaingan.

Adanya pergeseran nilai pendidikan telah disadari oleh Dave Hill yang mengungkapkan adanya intervensi kepentingan politik dalam dunia pendidikan. Pendapatnya ini dituangkan dalam jurnalnya yang berjudul “*Journal for Critical Education Policy Studies*” (2003), yang menyebutkan :

“I critique Neo-Liberal theory in education policy and suggest how the marketisation of education has deformed a number of aspect of education: its goals, motivation, methods, standards of exelence and standards of freedom in education. Saya mengkritik adanya teori Neo-Liberal dalam kebijakan pendidikan dan mengatakan bagaimana komersialisasi pendidikan telah

mengaburkan pembentukan beberapa aspek pendidikan seperti; tujuan, motivasi, metode, standar kepuasan dan standar lulusan.”

Berdasarkan pernyataannya di atas, Dave Hill berpendapat bahwa perubahan dunia pendidikan telah dipengaruhi oleh semangat kapitalisme melalui ideologi *Neo-Liberalisme*. Pembelajaran dalam dunia pendidikan saat ini telah mengalihkan orientasinya kepada bagaimana menghasilkan lulusan sekolah yang mempunyai keahlian atau kompetensi tertentu sehingga mampu menjadi tenaga siap kerja.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) bertujuan untuk menghasilkan sumber daya lulusan yang mempunyai kompetensi sehingga hasil belajarnya mampu digunakan sebagai bekal hidup dalam masyarakat. Sekolah juga dituntut memiliki swadaya dalam mengembangkan pembelajarannya. Jika demikian mungkinkah analisis Dave Hill juga terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia?

Sebagai suatu kebijakan pendidikan nasional, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) harus diterapkan oleh seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali Kota Malang. Kota Malang dikenal sebagai kota pelajar, sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi tersedia. Perkembangan pendidikan di Kota Malang dapat dilihat dari prestasi yang berhasil diraih selama ini, khususnya sekolah dasar. Hampir setiap tahun Kota Malang meraih prestasi gemilang dalam lomba siswa berprestasi tingkat nasional.

SDN Klojen II merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sejak tahun ajaran 2004/2005. Prestasi akademik dan non akademik yang cukup membanggakan, membuat SDN Klojen II menjadi salah satu sekolah dasar favorit di Kota Malang. Sebagai salah satu sekolah dasar negeri, tentu saja SDN Klojen II mampu menyediakan fasilitas dengan biaya pendidikan yang kecil sehingga tidak membebani orang tua siswa. Di sisi lain penerapan pembelajaran dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) membutuhkan sarana penunjang yang cukup besar, sedangkan jika harus bergantung pada dana bantuan pemerintah, yang jumlahnya jauh dari cukup, maka pihak sekolah akan kesulitan merancang program yang berkualitas. Hal ini tentu saja menjadi dilema bagi pihak sekolah untuk mengambil langkah, di satu sisi sekolah diharapkan tidak menarik biaya yang besar, tapi jika hanya bergantung pada bantuan pemerintah, kualitas belajar yang menjadi taruhan. Lalu sejauh mana SDN Klojen II mengatasi keadaan ini dalam mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi? Akankah terjadi komersialisasi sekolah akibat mahalnya biaya pendidikan ?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah **“Mengapa analisis implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar di SDN**

Klojen II Malang ?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian akan didahului dengan pertanyaan “Bagaimana proses implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dasar serta Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di SDN Klojen II Malang ?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan implementasi serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di SDN Klojen II Malang.
- b. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di SDN Klojen II Malang.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis
 - a. Bagi Mahasiswa
 1. Dapat meningkatkan respon mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah dan sekaligus untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh.

2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

b. Bagi Perguruan Tinggi

1. Dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian lanjutan.
2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan studi implementasi terhadap kebijakan pemerintah mengenai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kembali kebijakan di bidang pendidikan.
2. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai khususnya kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

b. Bagi Masyarakat

- Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Dasar Kebijakan dan Kebijakan Publik

Istilah kebijakan dan kebijaksanaan, sebagai penyebutan terhadap kebijakan publik, kebijakan Negara, kebijaksanaan Negara ataupun kebijaksanaan pemerintah merupakan istilah-istilah yang sering kita temukan, baik dalam acara diskusi publik terbuka, tulisan akademik hingga judul-judul buku yang mejadi panduan bagi para mahasiswa ilmu administrasi publik. Sampai saat ini istilah *public policy* memang masih belum memiliki terjemahan yang pasti di Indonesia. Hingga terkadang peneliti cenderung mengasumsikan kebijakan, misalnya, sebagai sebuah produk (sesuatu yang materiil atau sesuatu yang telah diputuskan melalui sistem politik yang memiliki keabsahan), sementara kebijaksanaan lebih mengacu pada sebuah proses dalam alur kebijakan yang mencakup formulasi, implementasi, maupun evaluasi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, tanpa bermaksud untuk mengukuhkan sebuah inkonsistensi konsepsi serta tanpa mencoba untuk memperdebatkan lebih jauh tingkat ketepatan terminologi serta latar belakang historis yang menyebabkan berkembangnya sedemikian banyak penyebutannya sebagaimana telah disampaikan di atas, maka dalam konteks penelitian ini peneliti berpendapat bahwa tidak ada perbedaan maksud dan makna yang signifikan di antara berbagai penyebutan tersebut. Mungkin memang perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam nantinya untuk

“menentukan mana yang tepat”. Namun dalam konteks penelitian ini, peneliti sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh John Lock ketika berkata: “apabila sesuatu hal itu memang sudah dimengerti dengan baik, saya tidak akan begitu peduli apapun namanya”. Oleh karena itu dalam kajian teoritis berikut penulis tidak menetapkan menggunakan satu terjemahan tertentu atas istilah *public policy*.

Laswell dan Caplan (dalam Islamy, 2001:18) mengemukakan bahwa kebijaksanaan adalah *a project program of a goal, values, and practice* (suatu program pencapaian tujuan, nilai, dan praktek yang terarah). Sementara Anderson dalam Solichin Abdul Wahab (2002:2) merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi. Selanjutnya Frederich dalam Solichin Abdul Wahab (2002:3) mengatakan bahwa kebijaksanaan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan salah satu contoh kebijakan publik. Untuk dapat lebih memahami hakikat kebijakan publik sebagai suatu jenis tindakan yang mengarah kepada tujuan, maka menurut Solichin Abdul Wahab (2002:10) kebijakan publik terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Tuntutan kebijaksanaan (*policy demands*) ialah tuntutan atau desakan yang ditujukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu.
2. Keputusan kebijaksanaan (*policy decisions*) adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik.
3. Pernyataan kebijaksanaan (*policy statement*) adalah pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan publik tertentu, termasuk dalam hal ini adalah ketetapan-ketetapan MPR, UU, Keppres, Peraturan Administratif, dll.
4. Keluaran kebijaksanaan (*policy output*) merupakan wujud kebijakan publik paling dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.
5. Hasil akhir kebijaksanaan (*policy outcomes*) adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari

adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Terkait dengan poin pertama dalam kategorisasi di atas, maka jelas bahwa munculnya suatu kebijakan pasti berangkat dari adanya serangkaian tuntutan (aspirasi dan kondisi obyektif masyarakat) yang mungkin dapat murni sebagai kepentingan publik, namun dapat pula merupakan hasil dari sebuah usaha (rekayasa) yang dilakukan elit. Namun apapun pertimbangan pragmatis politisnya, setiap kebijakan publik idealnya tetap harus selalu berorientasi dan berpijak pada kepentingan publik (*public interest*).

B. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

1. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Perkembangan masyarakat dewasa ini memperlihatkan adanya perubahan sosial atau transformasi sosial yang berjalan sangat pesat apalagi di dalam kehidupan globalisasi abad 21. Kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi, telah mempercepat transformasi sosial dalam masyarakat dunia. Seiring dengan perubahan sosial ini, paradigma pendidikan sebagai sarana transformasi sosial, lebih jauh telah menjadi suatu identitas kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa. Proses pendidikan bukan hanya memperhatikan manusia untuk menjadi “*human being*” tetapi lebih pada memperlakukan manusia seutuhnya (*being human*) yang mampu mengembangkan kebudayaannya dan mengembangkan hak asasi manusianya.

Bergulirnya era globalisasi dan pasar bebas menghadapkan manusia pada perubahan-perubahan tidak menentu. Ibarat nelayan di lautan lepas yang dapat menyesatkan jika tidak memiliki “kompas” sebagai pedoman untuk bertindak dan mengarunginya. Hal inilah yang akan terjadi pada suatu bangsa yang belum siap menyambut persaingan bebas. Persaingan ekonomi menuntut pendidikan dapat menghasilkan output sumber daya manusia yang menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan dunia untuk mewujudkan kemajuan serta kemakmuran seperti yang telah diidamkan oleh setiap bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan pergeseran pandangan serta orientasi pembelajaran dalam sistem pendidikan.

Sistem pendidikan yang selama ini berlaku menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, dimana terjadi suatu hubungan yang tidak linear antara pendidikan dengan lapangan kerja. Hal ini terjadi karena apa yang terjadi pada dunia kerja sulit diikuti oleh dunia pendidikan, sehingga terjadi kesenjangan. Sehubungan dengan hal tersebut serta menanggapi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia beberapa tahun terakhir, Direktur *Pacific Economic Cooperation* (Tilaar dalam Mulyasa, 2003:4) menyatakan bahwa bangsa-bangsa khususnya di Asia Pasifik perlu mempunyai “*outward and foward looking*”, yaitu mengenai pembangunan nasional yang jangan hanya melihat kepada kebutuhan internal masyarakat dan bangsa, tetapi juga pandangan tersebut perlu dijalin dengan pandangan eksternal dan ke depan.

Berdasarkan uraian di atas, jika suatu bangsa ingin mencapai kemajuan serta kemakmuran maka mereka harus mampu menciptakan sistem pendidikan yang mendukung tujuan yang dicita-citakan. Berbicara mengenai sistem pendidikan tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan kurikulum yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara tradisional, sistem pendidikan menganggap bahwa kurikulum semata-mata soal teknis dari proses pendidikan. Tetapi mengingat bahwa kurikulum adalah program-program atau isi dari sistem pendidikan, maka kurikulum merupakan upaya untuk melaksanakan proses akumulasi ilmu pengetahuan antar generasi dalam suatu masyarakat. (Tilaar, 2003:127)

Sejalan dengan bergulirnya era globalisasi maka pendekatan yang digunakan dalam sistem pendidikan disusun berdasarkan pemenuhan kebutuhan tuntutan persaingan global sehingga dalam penyusunan kurikulum pendidikan diperlukan suatu pendekatan baru yang dapat mendukung proses pencapaian tujuan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Tilaar (2003) menyebutkan bahwa isi kurikulum ditentukan oleh perspektif mana seseorang memandang proses pendidikan. Dengan kata lain, kurikulum disusun berdasarkan perspektif tertentu. Jadi perspektif ilmu yang berbeda-beda akan menghasilkan ilmu yang berbeda-beda pula. Namun tuntutan persaingan sumber daya manusia telah sedikit banyak mempengaruhi perspektif pendidikan. Dewasa ini, berkaitan dengan reformasi pendidikan dan penyusunan kurikulum, memunculkan

dua model kurikulum yang menjadi pilihan yaitu kurikulum berdasarkan kompetensi (*competence-based curriculum*) serta kurikulum berdasarkan dasar yang luas (*broad-based curriculum*). Di Indonesia model kurikulum berdasarkan kompetensi dipilih sebagai dasar Kurikulum 2004 yang kemudian dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Kurikulum berdasarkan kompetensi merupakan alternatif yang lebih banyak dipilih oleh negara-negara di dunia meskipun dengan nama-nama yang berbeda. Korea, Jepang, Inggris dan Amerika merupakan negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkan model kurikulum berdasarkan kompetensi sehubungan dengan reformasi pendidikan yang mereka lakukan. Contohnya di Jepang dimana reformasi pendidikannya menghasilkan tiga kalimat kunci yang sering disebut, yaitu *kokoro-no-kyoiku* (pendidikan untuk hati, jiwa, atau kedirian manusia), *sogo-gakushyu* (pembelajaran holistik), dan *tokushyoku, koseika* (keunikan masing-masing sekolah dan masing-masing individu). **(Suara Pembaharuan, 9 Juni 2005)**

Pertanyaan yang timbul adalah mengapa kurikulum berdasarkan kompetensi lebih banyak dipilih sebagai alternatif dalam reformasi kurikulum? Jawaban yang mungkin diberikan adalah karena pendekatan yang digunakan dalam model ini adalah pendekatan kompetensi yang memungkinkan diterapkannya model "Pendidikan Holistik Berbasis Karakter". Model pendidikan holistik ini adalah pendidikan yang secara eksplisit ditujukan untuk mengembangkan seluruh dimensi manusia, yaitu

aspek akademik (kognitif), emosi, sosial, spiritual, motorik, dan kreativitas. Oleh karena itulah dengan model ini dunia pendidikan diharapkan dapat membina potensi peserta didik sebagai kekuatan menghadapi dunia nyata yang nantinya lebih jauh mampu digunakan sebagai bekal menghadapi persaingan global.

Kurikulum berdasarkan kompetensi yang dalam dunia pendidikan Indonesia disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dianggap mampu menjawab tujuan reformasi pendidikan yang sedang berlangsung. Secara definitif, Depdiknas (2002) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Berdasarkan definisi tersebut yang perlu ditekankan adalah bahwa Kurikulum Berbasis Kompetensi bukan merupakan suatu metode melainkan merupakan suatu standar kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan lembaga pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa standar kompetensi sangat ditekankan dalam model kurikulum berbasis kompetensi. Berkaitan dengan hal tersebut Nurhadi (2004:16) mengemukakan yang dimaksud dengan kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai dasar yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Lebih lanjut McAshan (dalam Nurhadi, 2004:16) mengemukakan yang dimaksud dengan kompetensi adalah:

“...is knowledge, skills, and abilities that a person achieves, which become part of his or her being to extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviour. (kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya).”

Lebih lanjut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumusan kompetensi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan pernyataan yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam setiap tingkatan kelas dan sekolah, serta menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten.

Pendekatan kompetensi merupakan pendekatan pengembangan kurikulum yang memfokuskan pada penguasaan kompetensi tertentu berdasarkan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Peserta didik berada dalam proses perkembangan yang berkelanjutan dari seluruh aspek kepribadian, sebagai pemekaran terhadap potensi-potensi bawaan sesuai dengan kesempatan belajar yang ada dan diberikan oleh lingkungan. Setiap tahap perkembangan memiliki sejumlah potensi bawaan yang dapat dikembangkan, tetapi perkembangannya sangat tergantung pada kesempatan yang ada dan kondisi lingkungannya. Pendidikan merupakan lingkungan utama yang memberikan kesempatan dan dukungan bagi perkembangan potensi-potensi peserta didik. Perlu diingat, setiap peserta didik memiliki potensi bawaan sendiri-sendiri, meskipun aspek-aspek perkembangannya sama tetapi tingkatannya berbeda-beda. Jadi harus ada perhatian besar terhadap hal itu.

Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi didasari oleh tiga landasan teoritis (Mulyasa, 2003:42). Landasan teoritis tersebut adalah :

1. Adanya pergeseran dari pembelajaran kelompok ke arah pembelajaran individual. Dalam pembelajaran individual setiap peserta didik dapat belajar sendiri, sesuai dengan kemampuan masing-masing, serta tidak bergantung kepada orang lain.
2. Pengembangan konsep belajar tuntas (*mastery learning*) atau belajar sebagai penguasaan (*learning for mastery*) yaitu suatu falsafah pembelajaran yang mengatakan bahwa dengan sistem pembelajaran yang tepat, semua peserta didik dapat mempelajari semua bahan yang diberikan dengan hasil yang baik.
3. Pendefinisian kembali terhadap bakat. Berkaitan dengan hal ini Hall (1986) menyatakan bahwa setiap peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, jika diberikan waktu yang cukup. Jika asumsi ini diterima maka perhatian lain dicurahkan kepada waktu yang cukup untuk kegiatan belajar.

Sesuai dengan uraian di atas mengenai deskripsi dari kurikulum berbasis kompetensi yang mengutamakan pendekatan kompetensi dalam proses belajar mengajarnya, dapat dipahami mengapa model kurikulum ini dipilih menjadi alternatif dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing dalam dunia global. Standar kompetensi memungkinkan dunia pendidikan menciptakan sumber daya

manusia yang tidak hanya mendapat pengalaman teoritis saja namun lebih pada pengalaman praktis yang dapat digunakan untuk menunjukkan eksistensi dirinya dalam kehidupan nyata. Karena perkembangan dunia yang semakin kompleks menuntut manusia sebagai subyek aktif pelaksana pembangunan, bukan hanya sebagai obyek. Manusia yang memiliki kekuatan dari diri mereka sendiri akan mampu bertahan hidup dalam persaingan global, sedang yang tidak akan tertindas dan semakin jauh tertinggal bahkan terasing dari perkembangan dunia.

2. Relevansi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di Indonesia

Masyarakat dunia, termasuk Indonesia, dewasa ini mengalami perubahan yang sangat cepat yang tentunya menuntut pandangan-pandangan baru dalam dunia pendidikan. Perubahan sosial akibat adanya era globalisasi, berarti dunia sebagai suatu “*global village*”, paling berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Kenyataan ini menuntut cara hidup yang berbeda dan serba terbuka. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat telah mengubah wajah dunia yang sedang menuju kepada suatu dunia pembelajaran. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat pesat dan dapat diakses oleh semua manusia. Tentunya keadaan ini membutuhkan manusia-manusia pembelajar, yang tidak akan tertindas dalam kehidupan dunia yang berubah.

Perubahan sosial akibat globalisasi menuntut lembaga pendidikan yang mampu menjawab tantangan perubahan sosial tersebut, terutama dalam menghasilkan

sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Tantangan ini tentunya juga berlaku bagi dunia pendidikan Indonesia. Untuk menjawabnya pemerintah mulai mengadakan perubahan terhadap sistem pendidikan nasional yang bertujuan mampu mempersiapkan manusia Indonesia untuk bersaing dalam kehidupan globalisasi.

Sebagai suatu bagian dari pemerintahan, perubahan sistem pendidikan tidak dapat lepas dari peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan penyelenggara negara. Seperti yang diketahui, negara mempunyai dua fungsi besar, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat banyak serta mempersatukan rakyat dalam suatu wadah negara. Menyelenggarakan kesejahteraan rakyat berarti di dalamnya termasuk kesehatan dan pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan hak asasi manusia dan merupakan syarat bagi kemajuan suatu masyarakat atau negara. Jadi dengan sendirinya pendidikan merupakan peran utama dari negara namun seiring dengan perubahan ketatanegaraan Indonesia maka peran ini pun mengalami perubahan.

Berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mendasari penerapan sistem Otonomi Daerah dalam pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu otonomi daerah sebagai hasil dari perubahan ketatanegaraan Indonesia juga membawa pengaruh terhadap penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan dasar. Pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh pada dilaksanakannya desentralisasi tugas-tugas pendidikan kepada pemerintah daerah. Kewenangan atau tugas-tugas pendidikan tidak lagi harus seluruhnya ditangani oleh negara (pemerintah pusat). Jadi

dapat dikatakan bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah telah terjadi pergeseran peran negara, dalam hal ini pemerintah pusat, dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dasar di Indonesia. Pergeseran tersebut tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Perubahan Peran Negara dalam Pendidikan

Peran	Sebelum Otonomi Daerah	Otonomi Daerah
Pemerataan pendidikan	Berorientasi target	Berorientasi kualitas
Kualitas	Dicapai melalui evaluasi dan standardisasi semu melalui ujian terpusat dan kurikulum baku bersifat nasional.	Sebagai prioritas utama yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Proses	Tidak dipentingkan; yang penting ialah tercapainya target kuantitatif.	Sangat penting karena yang dipentingkan adalah perubahan tingkah laku dan <i>outcome</i> pendidikan.
Metodologi	Indoktrinasi	Dialogis
Manajemen	Negara dan birokrasinya memegang peranan sentral.	Manajemen berpusat pada institusi sekolah.
Pelaksanaan servis pendidikan	Pemerintah sebagai pelaku utama.	Pemerintah sebagai partner yang cukup menetapkan arah.
Perubahan sosial	Terarah dan opresif	Demokratis dan <i>grass-root</i>
Perkembangan demokrasi	Menentukan bingkai kehidupan berdemokrasi terbatas pada prosedur.	Mengembangkan perubahan tingkah laku demokratis secara substantif.
Perkembangan sosial ekonomi masyarakat setempat	Bukan menjadi bahan pertimbangan penyusunan kurikulum.	Salah satu komponen pokok penyusunan kurikulum.
Perkembangan nilai-nilai moral dan agama	Ditentukan oleh pemerintah pusat.	Berakar dari budaya dan agama setempat.

Nasionalisme	Pemaksaan dari atas dan bersifat formalistik. Mengabaikan identitas daerah.	Pendekatan multikultural
Pendanaan	Seluruhnya menanggung pembiayaan pendidikan. Dana sebagai alat pelestarian kekuasaan pemerintah.	Selektif sebagai lembaga pemersatu nasional dalam pemerataan, kualitas, dan persatuan nasional.
Pelaksanaan wajib belajar 9-12 tahun	Ditentukan secara terpusat oleh pemerintah pusat.	Sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Pelaksanaan secara bertahap sesuai dengan kondisi ekonomi daerah.

Sumber: Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat adanya pergeseran peran negara dalam dunia pendidikan di era otonomi daerah dewasa ini. Tampak bahwa otonomi daerah telah merubah sistem pendidikan yang semula bersifat sentralistik menjadi lebih terdesentralisasi. Berlakunya pola desentralistik kewenangan tentu saja menuntut adanya restrukturisasi sistem pendidikan nasional sehingga sesuai dengan semangat otonomi daerah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, restrukturisasi sistem pendidikan tidak bisa lepas dari pendefinisian serta perumusan kembali kurikulum pendidikan nasional. Apalagi tuntutan globalisasi yang semakin tinggi terbukti tidak bisa dipenuhi oleh sistem pendidikan nasional melalui kurikulum 1994 yang selama ini digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa kurikulum 1994 yang digunakan selama ini tidak mampu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai daya saing.

Ketidaksesuaian kurikulum 1994 dengan perubahan jaman tampak pada peringkat sumber daya manusia Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Berdasarkan laporan *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* yang berkedudukan di Hongkong, sebagaimana dimuat dalam *The Jakarta Post* (vol.19, No.127:2001), diungkapkan bahwa sistem pendidikan Indonesia adalah yang terburuk di Asia, mutunya dengan skor 6.56, masih di bawah Negara Vietnam dengan skor 6.21, dan Negara-negara tetangga di Asia. (Syafaruddin,2003:10)

Hal senada diungkapkan juga oleh Harsono (2003), yang mengemukakan bahwa saat ini, berdasarkan *Human Development Index (HDI)* 2003 yang diterbitkan oleh UNDP, Indonesia berada pada peringkat 112 dari 175 negara dalam hal kualitas SDM. Peringkat ini masih di bawah Vietnam yang berada di peringkat 109. padahal sebagai pembanding, pada tahun 1996 Indonesia berada pada peringkat 105, sedangkan Vietnam berada di peringkat 107. Organisasi Internasional yang lain juga menguatkan hal tersebut. Sedangkan dalam Nurhadi (2004) disebutkan bahwa *International Educational Achievement (IEA)* melaporkan mengenai kemampuan membaca anak-anak SD di Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara yang disurvei. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kualitas SDM manusia Indonesia belum memiliki daya saing, justru pada saat negara lain mengejar kekuatan daya saingnya secara global.

Berusaha untuk menjelaskan kondisi di atas, Tilaar (dalam Mulyasa, 20034) mengemukakan bahwa pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada empat krisis pokok, yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Lebih lanjut dikatakan bahwa sedikitnya ada enam masalah pokok sistem pendidikan nasional: (1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik, (2) pemerataan kesempatan belajar, (3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, (4) status kelembagaan, (5) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan (6) sumber daya yang belum profesional.

Menghadapi keadaan tersebut, maka perlu dilakukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Oleh karena itulah seiring dengan semangat bergulirnya otonomi daerah, sistem pendidikan juga menuntut untuk segera direstrukturisasi. Restrukturisasi sistem pendidikan diarahkan pada pandangan bahwa pendidikan merupakan kehidupan, untuk itu kegiatan belajar harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (*life skill atau life competency*) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan peserta didik. Tujuan ini tercermin dalam visi dan misi pendidikan nasional.

Sistem pendidikan nasional mengatakan bahwa Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya masyarakat madani sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia

baru dengan tatanan kehidupan yang sesuai dengan amanat proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses pendidikan. Masyarakat Indonesia baru adalah masyarakat yang memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung hak asasi manusia, serta berpengertian dan berwawasan global. Sedangkan misi dari pendidikan nasional adalah menuju masyarakat madani, dalam bidang pendidikan penyelenggaraan organisasi pelaksanaan pendidikan yang otonom, luas namun adaptif dan fleksibel, bersifat terbuka dan berorientasi pada keperluan dan kepentingan bangsa, perimbangan wewenang dan partisipasi masyarakat berkembang secara alamiah, pendidikan mampu menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang berwawasan global, memiliki komitmen nasional dan bertindak secara lokal menuju keunggulan, serta menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat peradaban. (Mulyasa, 2003:19)

Visi dan misi tersebut merupakan arah dari perubahan sistem pendidikan nasional. Pertimbangan penting yang juga tidak dapat diacuhkan dalam proses restrukturisasi pendidikan adalah bahwa sistem pendidikan nasional tidak boleh bertentangan dengan ideologi Pancasila serta kondisi manusia Indonesia yang multikultural. Tilaar (2003:113) menyebutkan bahwa proses pendidikan berkenaan dengan hakikat manusia dalam lingkungan kebudayaan tertentu. Oleh karena itulah filsafat pendidikan Indonesia tentunya berkenaan dengan gambaran manusia dalam lingkungan kebudayaan Indonesia.

Pandangan manusia dalam lingkungan suatu kebudayaan merupakan suatu perspektif tertentu yang mungkin saja akan terus berubah sesuai dengan perkembangan pengertian manusia mengenai kebudayaan. Selanjutnya dalam Tilaar (2003:123) dikemukakan bahwa perspektif kebudayaan Indonesia tercermin dalam kesepakatan bangsa Indonesia untuk membangun kesatuan bangsa dan masyarakat yang pluralis. Keinginan untuk mewujudkan masyarakat seperti yang dicita-citakan tersebut dapat ditempuh melalui proses pendidikan dengan memenuhi dua unsur yaitu masyarakat yang bermoral dan masyarakat yang cerdas. Gambaran manusia yang bermoral dan cerdas bukanlah gambaran manusia yang telah dicapai tetapi merupakan potensi-potensi dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia Indonesia yang dicita-citakan hendaknya merupakan proses pemberdayaan (*empowering*) dari manusia itu. Pemberdayaan bukan berarti penuangan ke dalam suatu bejana sumber daya dari luar, melainkan mengembangkan potensi-potensi dari sumber daya yang berada di dalam individu manusia Indonesia.

Sejalan dengan uraian di atas maka, serta dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, mengantisipasi perubahan-perubahan sosial pada persaingan global, dan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perubahan sistem pendidikan harus dikondisikan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dimana dalam hal ini, sekolah sebagai sebuah masyarakat kecil (*mini society*) yang merupakan wahana pengembangan peserta didik, dituntut untuk menciptakan iklim

pembelajaran yang demokratis, agar terjadi proses belajar yang menyenangkan serta mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki peserta didik. Berkaitan dengan perubahan sistem pendidikan dan kurikulum 1994 yang dianggap tidak lagi sesuai untuk menghadapi persaingan dewasa ini, maka para ahli pendidikan memutuskan perlu diterapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (*competency based curriculum*) yang dianggap dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang dapat menjawab tantangan arus globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, dan adaptif terhadap berbagai perubahan.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam dasar negara. Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro, meso, maupun mikro. Kerangka makro erat kaitannya dengan upaya politik yang saat ini sedang ramai dibicarakan yaitu desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, aspek mesonya berkaitan dengan kebijakan daerah tingkat propinsi sampai tingkat kabupaten, sedangkan aspek mikro melibatkan seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah, tetapi terdepan dalam pelaksanaannya, yaitu sekolah. (Mulyasa, 2003:8)

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dipandang sebagai alternatif perbaikan mutu pendidikan karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kompetensi. Yang perlu diingat bahwa Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) bukan merupakan metode pembelajaran namun merupakan suatu standar kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap lulusan lembaga pendidikan. Pendekatan sistem pendidikan melalui penentuan standar dipandang lebih mampu mencapai tujuan pendidikan nasional secara pragmatis bukan teoritis. Berkaitan dengan masalah tersebut, kita dapat mengambil pengalaman Amerika Serikat dalam usahanya meningkatkan mutu pendidikan nasionalnya.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang mempunyai pengalaman dalam reformasi pendidikan nasionalnya. Sebagai negara federal yang demokratis, pendidikan di Amerika Serikat ditangani oleh tiga lembaga, yaitu pemerintah federal, pemerintah negara bagian, dan pemerintah lokal. Pembagian kewenangan ini membuat Amerika Serikat tidak mengenal sistem pendidikan yang berlaku untuk semua negara bagian.

Kekhawatiran terhadap mutu pendidikan di Amerika Serikat dimulai pada masa perang dingin, yang memunculkan kesadaran akan ketertinggalan Amerika Serikat dari kemajuan teknologi Rusia yang pada tahun 1957 sukses mengirim astronot pertamanya melintasi orbit bumi. Sejak itu Amerika Serikat menyadari kemungkinan ketertinggalannya disebabkan oleh mutu pendidikan mereka. Diawali

oleh laporan yang diterbitkan oleh *National Commission on Exellent in Education* pada tahun 1983 yang berjudul *A Nation at Risk: The Imperative of School Reform* telah menyadarkan para pakar pendidikan untuk mengadakan reformasi besar-besaran terhadap mutu pendidikan Amerika Serikat. Maka dimulailah apa yang disebut gerakan standardisasi pendidikan nasional. Satu kesadaran juga yang timbul dari reformasi pendidikan ini adalah, proses penentuan standar pendidikan nasional tidak dapat lepas dari peran serta pemerintah federal, termasuk membentuk Undang-Undang untuk peningkatan mutu pendidikan, khususnya pendidikan menengah ke bawah, yang disebut dengan *National Goal 2000: Educate America Act*.

Upaya menaikkan mutu pendidikan dengan mengeluarkan standar nasional yang ditentukan pemerintah federal secara suka rela diikuti oleh setiap sekolah di Amerika Serikat. Sesudah 20 tahun sejak lahirnya *A Nation at Risk*, bulan Januari 2003 diluncurkan suatu buku yang diedit oleh David T. Gordon yang berisi laporan yang berjudul *A Nation Reformed ? American Education Twenty Years After a Nation at Risk*. Buku ini menekankan kepada berbagai upaya peningkatan standar yang pada akhirnya berpusat kepada perbaikan proses belajar mengajar.

Pengalaman Amerika Serikat dalam upaya menentukan standar nasional bagi peningkatan mutu pendidikan membuktikan mengenai pentingnya standar sebagai sarana pengendalian mutu , yaitu ukuran-ukuran untuk mengetahui atau mengontrol

kualitas pendidikan. Diane Ravitch (dalam Tilaar, 2003:239) mengemukakan ada tiga jenis standar, yaitu:

1. Standar Isi, yaitu berkaitan dengan deskripsi ilmu pengetahuan atau keterampilan yang diinginkan untuk dipelajari oleh peserta didik. Standar ini dapat ditentukan oleh para pakar bekerja sama dengan *stakeholder* lainnya dalam bidang pendidikan.
2. Standar penguasaan atau *performace*, yaitu berkenaan dengan kemampuan penguasaan bahan yang telah diajarkan. Standar ini dapat dilaksanakan oleh organisasi-organisasi profesional.
3. Standar sumber-sumber belajar (*opportunity-to-learn*, OTL), yaitu berkenaan dengan tersedianya sumber-sumber yang memadai untuk belajar, yang disiapkan oleh sekolah, komite sekolah, dan dewan sekolah. Sumber-sumber belajar ini bukan hanya berupa program tetapi juga meliputi staf pengajar.

Selanjutnya menurut Mulyasa (2003:24) dalam pendidikan terdapat dua jenis standar, yaitu standar akademis (*academic content standards*) dan standar kompetensi (*performance standard*). Standar akademis merefleksikan pengetahuan dan keterampilan esensial setiap disiplin ilmu yang harus dipelajari oleh seluruh peserta didik. Sedangkan standar kompetensi ditujukan dalam bentuk proses atau hasil kegiatan yang didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai penerapan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya. Dengan demikian standar

akademik bisa sama untuk seluruh peserta didik, tetapi standar kompetensi bisa berbeda.

Kurikulum sebelumnya, Kurikulum 1994, merupakan standar akademis yang harus dikuasai oleh seluruh peserta didik, dengan merinci tujuan pembelajaran setiap pokok bahasan dan cara mencapai tujuan. Sedangkan yang diperlukan oleh pendidikan nasional saat ini untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional adalah standar kompetensi minimal. Batasan kompetensi ini perlu dirumuskan secara eksplisit dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional. Standar kompetensi diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kurikulum.

Sebagai suatu standar kurikulum, dalam proses implementasinya KBK mempunyai karakteristik yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Karakteristik dari Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah:

- a. Menekankan pencapaian kompetensi peserta didik, bukan tuntasnya materi
- b. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa (normal, sedang, dan tinggi)
- c. Berpusat pada peserta didik
- d. Orientasi pada proses dan hasil
- e. Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual

- f. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan (peserta didik dapat belajar dari apa saja)
- g. Buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar
- h. Belajar sepanjang hayat; belajar mengetahui (*learning how to know*), belajar melakukan (*learning how to do*), belajar menjadi diri sendiri (*learning how to be*), belajar hidup dalam keberagaman (*learning how to live together*).

Berdasarkan karakteristik di atas dapat dipahami jika Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dianggap mampu menjawab tuntutan terhadap dunia pendidikan nasional untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing. Hal ini melihat pada pendekatan yang digunakan yang berpusat pada diri peserta didik sebagai manusia, sehingga nantinya setiap peserta didik mendapat pengalaman praktis tidak hanya pengalaman teoritis seperti yang menjadi ciri kurikulum sebelumnya, Kurikulum 1994.

Tabel 2
Perbedaan Kurikulum 1994 dengan Kurikulum 2004

Kurikulum 1994	Kurikulum 2004 (KBK)
Berbasis Isi/materi	Berbasis Kompetensi
Menekankan pada ketuntasan materi pelajaran	Menekankan pada pencapaian kompetensi
Pada prakteknya, aspek kognitif lebih diperhatikan dibandingkan faktor afeksi dan psikomotorik.	Perimbangan antara aspek kognitif dan psikomotorik.
Pengembangan kurikulum bersifat sentralisasi.	Pengembangan kurikulum bersifat desentralisasi.
Kurikulum bidang studi berisi daftar materi yang diajarkan, berupa daftar topik yang harus dikuasai siswa.	Kurikulum bidang studi berisi daftar kompetensi standar (standar minimal) yang harus dikuasai siswa.

Sumber: Nurhadi, Kurikulum 2004

Penetapan standar kompetensi dan standar mutu pendidikan nasional merupakan jaminan bagi lajunya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas nasional. Standar mutu pendidikan nasional diukur dengan sejauh mana tujuan pendidikan nasional seperti yang tercermin dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dapat dicapai.

Menurut Depdikbud (1996: 8) definisi mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen

tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Nilai tambah ini diketahui dari input, proses dan output pendidikan.

a. Input Pendidikan

Input pendidikan merupakan segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya yang meliputi sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses.

b. Proses Pendidikan

Pendidikan berskala mikro (tingkat pendidikan) mengenal proses pendidikan sebagai proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar dan proses monitoring dan evaluasi.

c. Output Pendidikan

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah yang berarti bahwa prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitas, efektifitas, produktifitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja dan moral kerjanya. Output sekolah dikatakan bermutu jika prestasi peserta didik menunjukkan pencapaian tinggi dalam; 1) hasil tes kemampuan akademik, berupa nilai ulangan

umum, UAN dan 2) prestasi di bidanglain seperti prestasi olah raga, kesenian, dan keterampilan.

D. Model Implementasi Kebijakan

Kebijakan dibuat oleh pejabat pemerintah untuk memberikan keabsahan, kewenangan, atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan negara. Kebijakan memiliki suatu siklus yang dimulai dari agenda setting, formulasi, implementasi, evaluasi, perubahan, dan kembali ke agenda setting. Dalam siklus ini pembahasan akan difokuskan pada tahap implementasi kebijakan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999:129), yang dimaksud dengan implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Menurut Kamus Besar Webster dalam Abdul wahab (2002:64) secara singkat dirumuskan mengenai implementasi yang berarti bahwa *“to implement”* (mengimplementasikan) yaitu *“to provide the means for carryng out”* (menyediakan sarana untuk melaksanakan) *“to give practical effect to”* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab (2002:65), menjelaskan makna implementasi sebagai:

“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.”

Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut tindakan atau perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran. Ketaatan kelompok sasaran yang dimaksudkan dalam tulisan penelitian ini ditinjau dari dua aspek, yaitu:

- a. Ketaatan *Target Group*, yaitu ketaatan yang menjadi sasaran kebijakan, dimana yang dimaksud oleh kebijakan pendidikan nasional ini adalah sekolah dasar sampai sekolah menengah di seluruh wilayah Indonesia, khususnya SDN Klojen II Malang dengan segenap kemampuannya berupaya mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
- b. Ketaatan pelaksana administrasi yaitu aparatur pelaksana dalam memfasilitasi proses Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) terhadap petunjuk teknis yang ditetapkan.

Hal diatas sesuai dengan definisi kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy (2002:19) yang menyatakan bahwa:

“Kebijakan sebagai rangkaian yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tetentu. Keputusan tersebut menjadi pedoman bagi para pelaksana kebijakan untuk bertindak dalam usaha mengatasi masalah-masalah baik publik ataupun organisasi. Bentuk penerapan kebijakan publik dapat berupa program atau proyek, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik maupun berbentuk keputusan-keputusan pemerintah untuk menghadapi suatu masalah tertentu.”

Suatu kebijakan diimplementasikan menurut model yang berlaku, model implementasi inilah yang menentukan tingkat keberhasilan suatu kebijakan mencapai tujuannya. Dalam Solichin Abdul Wahab (2002:71-109), dikemukakan bahwa terdapat tiga model implementasi kebijakan yang sering kali digunakan dalam pola pelaksanaan kebijakan, yaitu:

- a. *The Top Down Approach* yaitu model yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn.

Dalam model ini, agar suatu implemntasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi/badan pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala serius;
2. untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai;
3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal;
5. hubungan saling ketergantungan harus kecil;
6. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
7. pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;

8. tugas-tugas harus diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
9. komunikasi dan koordinasi sempurna;
10. pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model ini lebih menekankan pada kebijakan aktor pelaksana dan kondisi yang mungkin terjadi di lapangan, sehingga dalam pelaksanaannya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi telah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan kegiatan program berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

- b. *Model Proses Implementasi Kebijakan* yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn.

Berdasarkan model ini, implementasi kebijakan dipandang sebagai prosedur-prosedur yang meliputi konsep-konsep; perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak. Kedua ahli tersebut mengemukakan mengenai hubungan antara kebijakan dengan prestasi kerja yang dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling terkait, yang terdiri atas:

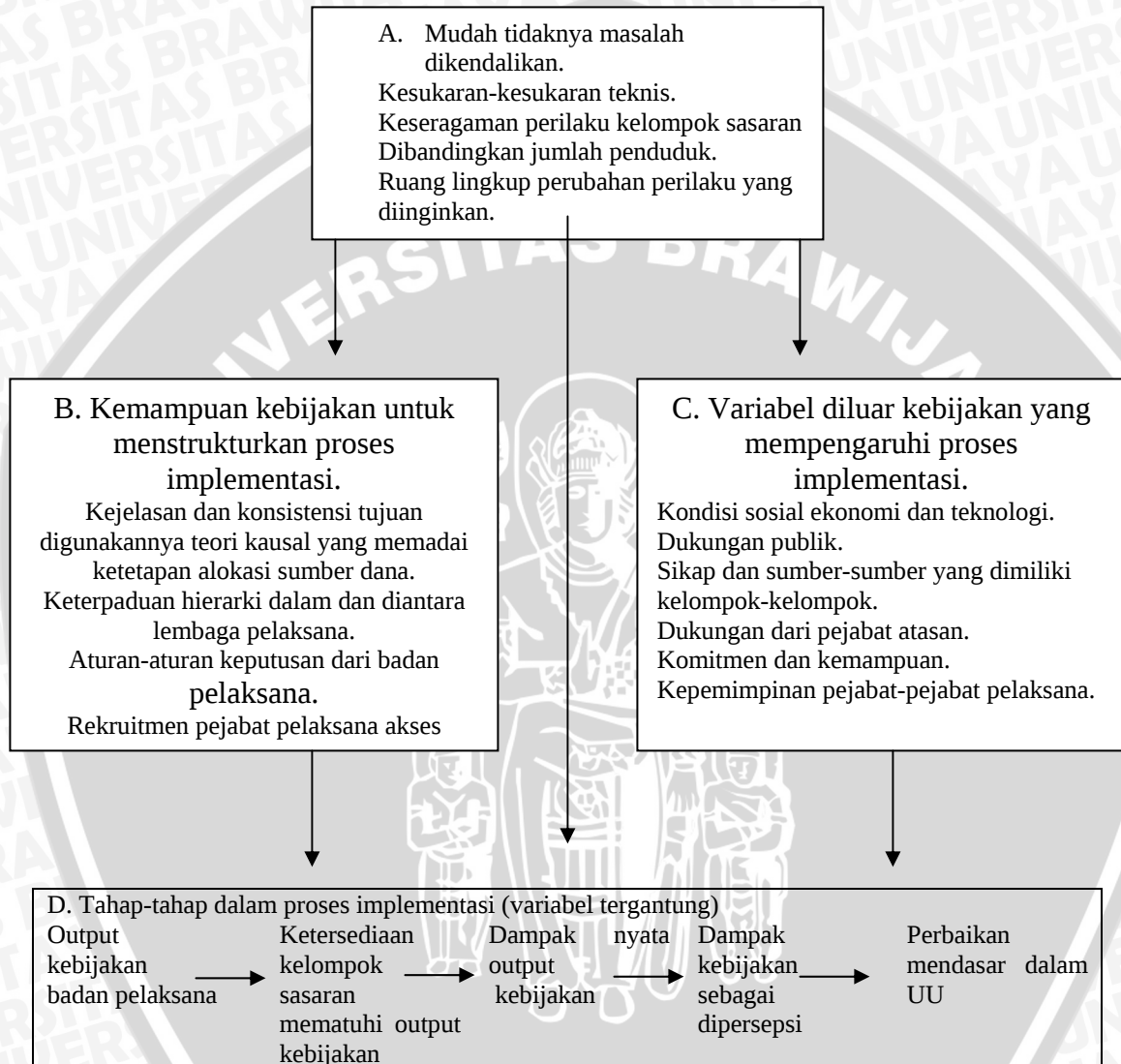
1. Ukuran dan tujuan kebijakan;
2. Sumber-sumber kebijakan;
3. Ciri-ciri atau sifat instansi pelaksana;

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
 5. Sikap para pelaksana
 6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
- c. *Model Kerangka Analisis Implementasi* yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.

Dalam model ini, implementasi kebijakan mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori dasar, yaitu:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan;
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstruktur secara tepat proses implementasinya;
3. Pengaruh langsung berbagai variabel-variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Gambar 1.
Variabel Proses Implementasi Kebijakan



Sumber: Solichin Abdul Wahab, 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.

Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), menurut penulis, paling ideal menggunakan model implementasi yang ketiga, yaitu yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Karena dalam model implementasi ini memungkinkan suatu kebijakan untuk dapat meramalkan faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat proses implementasi. Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan kebijakan dalam bidang pendidikan yang tentu saja dalam proses implementasinya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari sistem ketatanegaraan, sistem politik, ideologi, kebudayaan, sampai dengan ekonomi masyarakat. Semua aspek kehidupan tersebut saling terkait, saling mempengaruhi, serta harus dirumuskan secara seimbang. Jika salah satu aspek lepas dari pertimbangan, terutama dalam penyusunan kurikulum, maka akan berpengaruh pada pencapaian tujuan yang terkandung dalam kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Misalnya jika dalam penyusunan pertimbangan politik lebih besar maka implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) akan cenderung mendukung kepentingan-kepentingan elit yang berkuasa, sementara tujuan kebudayaan akan tersisih. Model implementasi ini juga memungkinkan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan dapat terimplementasikan sesuai dengan rumusan dasarnya.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan, atau dengan kata lain penerapan perencanaan ke dalam praktek. Namun, tidak semua program yang

diimplementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. Gejala ini menurut Dunsir dalam Solichin Abdul Wahab (2002:61) dinamakan sebagai *implementation gap*, sebagai suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).

Munculnya *implementation gap* memberikan kesadaran bahwa serasional apapun suatu kebijakan, tetap menyimpan potensi untuk gagal atau menyimpang dari tujuan awal ketika kebijakan tersebut dirumuskan. Secara teoritis, kegagalan atau banyaknya permasalahan yang mengiringi proses implementasi sebuah kebijakan, paling tidak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ketidakmampuan atau kelemahan aktor pelaksana di lapangan, kurangnya perangkat dan kekuatan penunjang bagi pelaksanaan kebijakan, adanya penolakan dan kondisi eksternal yang tidak kondusif atau dari awal kebijakan itu memang tidak bermutu.

Dalam implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi pun tidak dapat dipungkiri kemungkinan besar akan muncul adanya *implementation gap*, seperti yang digambarkan di atas. Hal ini bisa terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti yang telah disebutkan di atas, namun lebih pada latar belakang yang tersirat dalam penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Berkaitan dengan hal ini, Tilaar (2003:127) mengemukakan mengenai adanya kepentingan-kepentingan yang tersirat yang mengarahkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang

dikenal sebagai “*hidden curriculum*”. Jika dikaitkan dengan penyusunan kurikulum berbasis kompetensi maka akan timbul suatu pertanyaan mengenai esensi dari implementasi kurikulum baru ini. Apakah benar kurikulum berbasis kompetensi adalah kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini dalam rangka perubahan sistem pendidikannya, atau kebijakan kurikulum ini hanya merupakan suatu formalitas dari perubahan “kulit luar” model pendidikan namun isinya sama.

Tilaar (2003:84) mengemukakan mengenai besarnya pengaruh pemikiran politik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dimana sejak adanya pemikiran Hobbes mengenai politik, telah melahirkan dua aliran transformasi sosial yang berkaitan dengan pendidikan. Pertama yang menekankan pada paham liberalisme yang menekankan pada kelangsungan kehidupan budaya melalui apa yang diformulasikan oleh Talcot Parsons. Aliran yang kedua yaitu yang mengikuti tradisi marxisme yang menekankan pada konflik kelas menggantikan proses sosialisasi oleh Talcot Parsons. Menurut pemikiran ini, apa yang disebut sosialisasi oleh Talcot Parsons adalah sebenarnya penyerahan atau subordinasi dari kelas tertentu kepada ideologi hegemoni dari kaum borjuis. Di sinilah kita lihat peranan pendidikan dalam reproduksi kebudayaan dan transmisi ilmu pengetahuan. Pendidikan ditekankan kepada sistem nilai yang dipaksakan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Sedangkan dalam teori konflik marxisme, dikatakan proses pendidikan atau transmisi nilai-nilai budaya dan ilmu pengetahuan mengikuti struktur kekuasaan dalam

masyarakat. Dengan kata lain, apa yang disebut ilmu pengetahuan dan cara untuk memperolehnya ternyata merupakan sebagian dari proses struktur sosial, termasuk struktur kekuasaan yang hidup dalam masyarakat.

Kaitan antara pendidikan dan kekuasaan membawa kita pada masalah ideologi. Dalam kehidupan modern dewasa ini, terdapat beberapa ideologi yang berkembang, seperti liberalisme yang berubah menjadi neo-liberalisme, ideologi komunisme yang mengalami kegagalan pada akhir abad 20, dan demokrasi yang merupakan perkembangan dari ideologi liberal. Ideologi-ideologi ini tentunya memasuki relung-relung pendidikan bukan hanya dalam strukturnya tetapi juga isinya (kurikulumnya). Hal inilah yang sebenarnya harus diwaspadai dalam penyusunan kurikulum pendidikan apalagi mengingat adanya pendapat bahwa pendidikan bersifat tidak bebas nilai (memungkinkan munculnya nilai-nilai kepentingan tertentu). Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Dave Hill yang menyatakan bahwa globalisasi telah memperbesar ruang perkembangan ideologi neo-liberalisme yang mempengaruhi sebagian besar perubahan dan perkembangan dunia pendidikan. Dalam jurnalnya yang berjudul “*Journal for Critical Education Policy Studies*” (2003), Dave Hill mengatakan:

“I critique Neo-Liberal theory in education policy and suggest how the marketisation of education has deformed a number of aspect of education: its goals, motivation, methods, standards of exelence and standards of freedom in education. (Saya mengkritik adanya teori Neo-Liberal dalam kebijakan pendidikan dan mengatakan bagaimana komersialisasi pendidikan

telah mengaburkan pembentukan beberapa aspek pendidikan seperti; tujuan, motivasi, metode, standar kepuasan dan standar lulusan).”

Selanjutnya Dave Hill menambahkan:

“Restructuring of schooling and education has taken place internationally under pressure from local and international capitalist organization and compliant government. (Restrukturasasi sekolah dan pendidikan secara internasional terjadi dibawah tekanan organisasi kapitalis lokal maupun internasional dan tunduk kepada pemerintah).”

Melalui pernyataannya di atas Hill berusaha memberikan kesadaran bahwa nilai-nilai sistem pendidikan telah bergeser dari nilai luhurnya. Tuntutan globalisasi yang semakin mendesak telah menyuburkan perkembangan neo-liberalisme, yang selalu diikuti oleh kapitalisme, telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Pendapatnya tersebut dibuktikan oleh analisisnya terhadap perubahan pendidikan di negara Inggris dan Amerika Serikat, yang menurutnya menunjukkan kecenderungan ke arah kapitalisme. Kecenderungan itu tampak pada perencanaan pendidikan di kedua negara tersebut yang mempunyai ciri-ciri:

1. Perencanaan yang memusatkan pada memproduksi tenaga kerja.
2. Perencanaan pendidikan memusatkan pada menciptakan tempat bebas bisnis dalam pendidikan untuk mencapai keuntungan.
3. Perencanaan untuk mengadakan bisnis pendidikan dan mencapai keuntungan dari aktivitas swasta secara internasional.

Neo-liberalisme merupakan perkembangan dari ideologi liberal. Ideologi ini merupakan jawaban dari adanya pengakuan bahwa liberalisme tidak dapat memajukan kelangsungan hidup bagi yang terkuat tetapi hanya menjamin eksploitasi orang banyak oleh sedikit orang. (Rodee, 1995:365)

Liberalisme erat kaitannya dengan kapitalisme mempunyai ciri sosial yang mencolok yaitu ketimpangan dan kesenjangan sosial yang tinggi, siapa yang kuat dan bermodal besar akan maju sedangkan yang lemah dan bermodal kecil akan tertindas, sehingga monopoli bidang-bidang kehidupan oleh sebagian kecil orang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, kaum neo-liberalisme menginginkan agar peranan pemerintah lebih besar dalam mengatur masalah-masalah publik seperti bidang ekonomi, pendidikan, dan beberapa bidang lain yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Namun tentu saja kepentingan dan kebebasan individu tetap memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, pemerintah hanya sebatas sebagai regulator.

Ketika kebutuhan persaingan global semakin menuntut perhatian, kebijakan pemerintah mengalami pergeseran ke arah pengutamaan pemenuhan kebutuhan sesuai tuntutan masyarakat dunia. Di sinilah peran pemerintah, dalam konteks neo-liberalisme, dapat memunculkan ideologi kapitalisme. Hampir semua kebijakan pemerintah berorientasi pada keuntungan sehingga tidak tertinggal dari negara lain. Dunia pendidikan yang tidak dapat lepas dari kekuasaan dan campur tangan

pemerintah tidak dapat menghindar dari kenyataan yang terjadi. Sehingga terjadi pergeseran orientasi nilai dalam tujuan pendidikan nasional, seperti yang telah digambarkan oleh Dave Hill sebelumnya.

Sejalan dengan pendapat Dave Hill tersebut di atas, Tilaar (2003:245) mengemukakan pendapatnya mengenai neo-liberalisme dan globalisme yang mempunyai tendensi untuk memperlemah kekuasaan negara. Akibatnya, dalam dunia pendidikan terdapat empat kecenderungan, yaitu: 1) sistem pendidikan mengacu pada sistem ekonomi pasar bebas, artinya memberikan tempat yang seluas-luasnya kepada masyarakat atau kekuatan pasar; 2) nilai-nilai dalam masyarakat seperti adat istiadat, keluarga, menjadi lemah; 3) terlalu menekankan kepada standar untuk mempertajam daya kompetitif agar dapat bersaing di pasar bebas; 4) pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan industri.

Perubahan sistem pendidikan nasional pada masa reformasi dewasa ini difokuskan untuk membenahi kurikulum nasional. Pokok-pokok pikiran yang dilontarkan untuk memperbaiki kurikulum, seperti pertimbangan relevansi atau kebutuhan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi menganggap kurikulum yang berlaku sebelumnya sangat intelektualitas dan tidak relevan dengan kehidupan masyarakat. Disadari atau tidak pernyataan inilah yang merupakan latar belakang dari lahirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan karakteristik serta ciri KBK, dapat dikatakan tujuan jangka

panjang KBK adalah menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mempunyai kompetensi diri. Menurut pandangan penulis, tujuan inilah yang dimaksud dengan nilai lain dalam implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dimana pemerintah Indonesia dituntut untuk mengikuti perkembangan perubahan sosial masyarakat dunia yang lebih mengunggulkan keahlian individu untuk dapat bersaing dalam kehidupan globalisasi.

Model pembelajaran dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menggunakan pendekatan kompetensi dengan pendekatan holistik berbasis karakter. Pendekatan ini berarti bahwa kegiatan belajar mengajar harus menyentuh pada kehidupan sehari-hari. Tentu saja hal ini menuntut sekolah sebagai penyelenggara pendidikan untuk menyediakan sumber daya pendukung yang lebih besar.

Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) memang menuntut swadaya sekolah dalam proses pengembangan metode belajar mengajarnya, mulai dari pengembangan kurikulum sampai pada penyediaan sumber daya pendukung yang meliputi anggaran pendidikan (sumber keuangan), sarana belajar, maupun dari segi sumber daya manusia pelaksana di tingkat sekolah. Khususnya di tingkat sekolah, diakui atau tidak, implementasi KBK membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan operasional sekolah yang semakin tinggi untuk mempersiapkan bahan ajar bagi siswa. Disisi lain, otonomi pendidikan sangat

berpengaruh pada kebijakan swadaya sekolah dalam hal pembiayaan pendidikan, meskipun masih ada bantuan dari pemerintah daerah.

Besar kecilnya bantuan pemerintah pusat dalam pembiayaan pendidikan tergantung pada kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Untuk wilayah Jawa Timur dan Bali, rasio anggaran pendidikan adalah 50% ditanggung pemerintah pusat, 30% pemerintah propinsi, dan 20% pemerintah kota/ kabupaten. **(Kompas, 1 Februari 2006)** Anggaran inipun lebih merupakan bantuan rehabilitasi sekolah, sedangkan biaya penyelenggaraan pendidikan diserahkan pada swadaya sekolah.

Keterbatasan anggaran pendidikan yang mengakibatkan keterbatasan sarana belajar mengajar menjadi masalah serius dalam implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Hasil supervisi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di 89 SMA percontohan, yang merupakan *pilot project* kebijakan KBK, menggambarkan bahwa fasilitas pendukung pelaksanaan KBK masih menjadi persoalan serius. **(Kompas, 4 Februari 2006)**

Komponen fasilitas yang dimaksud meliputi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, bahan ajar, dan sarana komunikasi. Padahal ketersediaan sarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum merupakan salah satu penunjang utama keberhasilan implementasi KBK. Masalah inilah yang kemudian dapat menjadi alasan pihak sekolah untuk mencari sumber anggaran dari orang tua siswa.

Melihat mekanisme implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi ini, yaitu pemerintah pusat yang menentukan standar kompetensi, maka kebijakan ini termasuk yang bersifat *top-down*. Kelemahan lain ketika kebijakan dirumuskan secara *top-down* adalah semakin besarnya *implementation gap* yang terjadi. Suatu kebijakan bisa saja dirumuskan secara sempurna di tingkat pusat namun ketika diimplementasikan di lapangan aktor-aktor pelaksana tidak mampu melaksanakannya, sehingga tujuan tidak dapat tercapai secara maksimal. Sehingga komponen pelaksana yang juga harus dipertimbangkan dalam proses implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah mengenai sumber daya guru sebagai pembimbing serta transfer pengetahuan yang dituntut untuk lebih kreatif. Mengingat bahwa model ini merupakan model pembelajaran yang difokuskan pada sebuah tema, kemudian dikembangkan pada berbagai macam bidang keilmuan. **(Jawa Pos, 17 Januari 2006)**

Ketika guru sebagai aktor utama dalam proses pendidikan tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang memenuhi syarat, maka implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) akan bertolak belakang dengan tujuan awalnya yaitu sebagai gerakan peningkatan mutu pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, tanpa bermaksud mengeluarkan hipotesa, penulis berpendapat bahwa kebutuhan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menimbulkan kecenderungan ke arah neo-

liberalisme. Tingginya kebutuhan sumber daya pendukung, khususnya ketersediaan dana serta sarana pendukung pendidikan, mengakibatkan biaya pendidikan semakin mahal yang lebih jauh lagi dapat memunculkan komersialisasi pendidikan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sarana bagi peneliti untuk mengumpulkan data dan menemukan data serta interpretasi data terhadap suatu fenomena yang akan diteliti. Jadi dapat dikatakan bahwa metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kegiatan untuk memudahkan peneliti mencapai tujuan.

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989) mengatakan bahwa penelitian merupakan suatu proses panjang, yang berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualitas, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Data kualitatif merupakan sumber deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi di lapangan. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran dan memperoleh penjelasan. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2004:7) bahwa yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini berawal dari menentukan pertanyaan, memilih narasumber yang sesuai, dan memilih data-data yang sesuai. Dari hasil tersebut kemudian diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Selama proses penelitian berlangsung, pemilihan data selalu diperbarui sejalan dengan hasil analisis yang dilakukan terus menerus sampai akhirnya diperoleh gambaran yang memungkinkan hasil yang layak disajikan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pusat perhatian yang bermaksud untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan dalam mempersepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Moleong (2004:94) bahwa penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian, tujuannya adalah; pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi dan yang kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau masukan-masukan suatu informasi yang baru dimasukkan.

Penelitian implementasi ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana implementasi dari kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) serta nantinya dapat diukur apakah proses implementasi berhasil atau tidak.

Fokus dari penelitian ini adalah:

1. Implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di SDN Klojen II Malang. Pembahasan akan melihat pada:

- a. Prosedur implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada instansi terkait, yaitu Dinas Pendidikan Kota Malang dan SDN Klojen II Malang.
- b. Kesiapan SDN Klojen II Malang dalam mengimplementasikan Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dapat dilihat berdasarkan pada potensi sumber daya manusia meliputi kepala sekolah, guru, dan siswa, serta potensi sumber daya pendukung meliputi potensi sarana dan prasarana sekolah, sumber anggaran dan peran serta orang tua siswa dalam perumusan kebijakan sekolah.
- c. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh SDN Klojen II Malang. Meliputi usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikannya.
- d. Kendala yang dihadapi oleh SDN Klojen II Malang dalam implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

2. Analisis implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi.

- a. Tingkat keberhasilan implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di SDN Klojen II Malang.

- b. Dampak yang muncul dari implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di SDN Klojen II Malang.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap kejadian sebenarnya dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan lokasi pada Kota Malang. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Malang, dengan pertimbangan bahwa selama ini Kota Malang dikenal sebagai Kota Pelajar. Sedangkan situs penelitian adalah obyek yang akan dilakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil situs pada SDN Klojen II Malang. Sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar yang berfungsi membentuk pribadi siswa, SDN Klojen II Malang dituntut untuk dapat memberikan model pembelajaran yang sesuai dengan konsep Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sehingga lulusan yang dihasilkan mampu bersaing dalam kehidupan masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang baik penelitian harus ditunjang oleh data yang akurat, data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Sumber data ini diperoleh langsung dari penelitian di lapangan melalui wawancara terhadap nara sumber, yaitu pihak Dinas Pendidikan Kota Malang yang diwakili oleh kepala seksi kurikulum pendidikan dasar, Kepala SDN Klojen II Malang, guru, serta orang tua murid.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, yaitu berupa dokumen yang meliputi agenda prestasi siswa, buku presensi siswa tiap kelas, juklak BOS, profil SDN Klojen II Malang, serta laporan yang meliputi laporan pertanggungjawaban dana BOS, laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tahun 2003 dan 2004, Rencana APBS 2005-2006, dan berita acara serah terima jabatan kepala sekolah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena data yang diperoleh diharapkan dapat digunakan untuk menjawab sekaligus memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu data tersebut harus valid dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Interview, teknik ini sering disebut wawancara, pelaksanaannya dengan proses tanya jawab antara peneliti dengan informan, mengenai obyek penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara *face to face* serta menggunakan daftar pertanyaan yang disampaikan kepada nara sumber yaitu pada Kepala seksi kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang, guru dan orang tua siswa SDN Klojen II Malang.
2. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud pengamatan langsung adalah mengamati langsung mengenai keadaan dan kenyataan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Sedangkan secara tidak langsung dengan mengamati dan menyimpulkan pendapat orang lain/ pengamat lain yang berada di lokasi penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan pada prosedur implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) serta sumber daya pendukung yang dimiliki SDN Klojen II Malang yang meliputi SDM, fasilitas belajar yang tersedia serta dukungan orang tua siswa terhadap implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
3. Dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan mencatat atau menyalin data-data yang ada dalam dokumen penelitian, khususnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini data yang akan

didokumentasikan meliputi profil, fasilitas, SDM, dan kebijakan SDN Klojen II Malang dalam implementasi KBK dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam upaya memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Maka instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi adalah:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan mengamati fenomena dan wawancara dengan kelompok sasaran yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu digunakan sebagai kerangka dasar dalam mengadakan wawancara dengan aktor yang terlibat sebagai sumber data dalam penelitian.
3. Catatan Lapangan (*field note*), catatan di lapangan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian.

G. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selama penelitian kemudian diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar dapat lebih berarti dan mampu diinterpretasikan, sehingga permasalahan dapat dipecahkan. Menurut Moleong (2004:247) yang dimaksud dengan analisa data adalah:

“Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.”

Dalam sebuah penelitian kualitatif, proses analisa data dan interpretasi data tidak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data atau berdiri sendiri, namun juga sudah dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini akan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Hubberman (1992: 20), yang terdiri atas:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dimulai pada saat memulai menentukan judul penelitian. Penentuan judul sangat memerlukan data-data yang mendukung bakal penelitian seperti ketepatan, kekhususan, kemanfaatan, kebaruan dan fungsi penelitian lainnya.

Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi proses seperti; membuat ringkasan, mengklasifikasi, dan reduksi data. Sebagai penjelasan atas data-data tertulis, kemudian penulis melakukan wawancara. Proses ini berlanjut

terus ketika mendapat data baru, termasuk selama penyajian data hingga laporan akhir lengkap tersusun. Data yang dimaksud adalah berupa jumlah fasilitas, guru, siswa serta sumber daya pendukung lain yang digunakan dalam implementasi KBK serta umpan balik yang diterima maupun fenomena yang timbul dari implementasi KBK di SDN Klojen II Malang.

2. Penyajian data

Proses ini dilakukan dengan memberikan gambaran umum mengenai implementasi kebijakan Kurikulum berbasis Kompetensi (KBK) di SDN Klojen II Malang. Tujuannya adalah agar pembaca memiliki gambaran lokus yang berkaitan dengan pemaparan hasil penelitian berikutnya. Selanjutnya analisis dilakukan berdasarkan fokus penelitian yang mendasarkan pada kajian teori dengan temuan di lapangan. Data-data yang telah diumpulkan pada poin pertama akan disajikan pada bab penyajian data sesuai dengan fakta di lapangan.

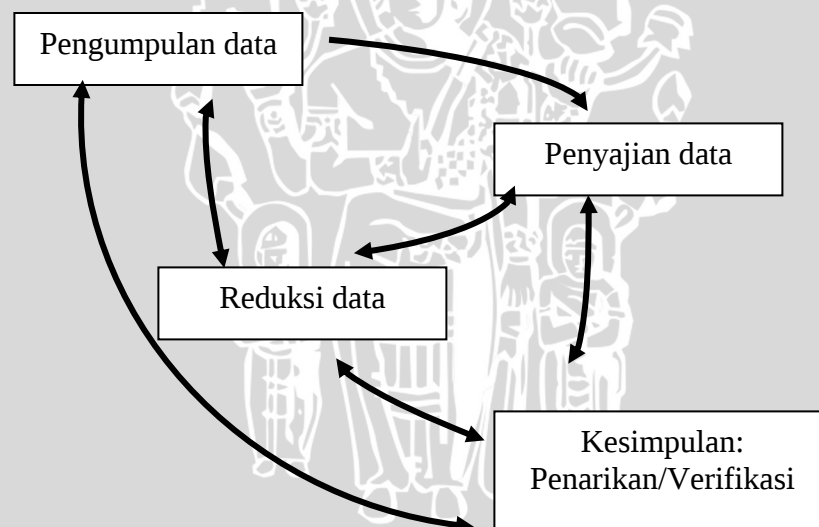
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Yaitu sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu mencari

pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat tentatif.

Penarikan kesimpulan didahului dengan analisis terhadap implementasi serta dampak yang ditimbulkan oleh implementasi kebijakan KBK di SDN Klojen II Malang. Penarikan kesimpulan tidak untuk menjadikan hasil penelitian ini sebuah pembenaran yang absolut tetapi semata-mata menyarikan hasil penelitian.

Gambar 2
Model Interaktif Analisis Data



Sumber: Miles dan Hubberman (1992: 20)

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Tinjauan Umum

1. Malang Sebagai Kota Pendidikan

Malang merupakan Kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Dikenal dengan ciri khas sebagai kota yang berudara dingin dengan ketinggian 440-667 meter di atas permukaan laut menjadikan Malang mempunyai daya tarik tersendiri bagi tempat tujuan wisata. Selain dikenal sebagai kota wisata, kota yang mempunyai semboyan “*Malang Kucecwara*” yang berarti “*Tuhan Menghancurkan yang Batil dan Menegakkan yang Benar*” juga dikenal sebagai Kota Pendidikan. Tercermin dari konsep pembangunannya yaitu Tri Bina Cita, yang berarti bahwa Malang sebagai Kota Pendidikan, Malang sebagai Kota Industri, dan Malang sebagai Kota Pariwisata, tampak bahwa pembangunan pendidikan di Kota Malang merupakan salah satu prioritas utama pembangunan.

Situasi kota yang tenang, harga makanan yang murah serta fasilitas pendidikan yang memadai menjadi modal untuk menarik pelajar dari luar kota untuk belajar di Malang. Saat ini Kota Malang memiliki 50 Perguruan Tinggi negeri dan swasta, termasuk lembaga pendidikan setara Diploma serta Taman Kanak-Kanak (TK) hingga SMU mencapai kurang lebih 800 lembaga. Belum ditambah dengan lembaga-lembaga kursus yang jumlahnya mencapai 240 buah. Dengan fasilitas serta

lengkapnya lembaga pendidikan yang dimiliki maka tidak heran jika ditinjau dari kemajemukan pelajar berasal dari hampir semua propinsi di Indonesia.

Berbicara mengenai pendidikan maka tidak dapat lepas dari membicarakan sekolah dasar yang merupakan lembaga pendidikan awal yang harus ditempuh untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada jenjang sekolah dasar inilah peserta didik mulai dikenalkan pada dunia belajar secara terstruktur. Sekolah dasar jugalah yang berperan penting dalam membentuk pribadi awal seorang peserta didik. Saat ini terdapat 327 lembaga pendidikan sekolah dasar, baik negeri maupun swasta serta MI, terdapat di Kota Malang serta 81.704 siswa sekolah dasar. Pembagian jumlah sekolah dasar menurut statusnya serta jumlah siswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Jumlah Sekolah Dasar di Kota Malang Tahun 2005

No	Status Sekolah Dasar	Jumlah	Jumlah siswa
1.	Sekolah Dasar Negeri	215	57.531
2.	Sekolah Dasar Swasta	59	13.391
3.	Madrasah Ibtidaiyah	48	10.605
4.	Sekolah Luar Biasa	5	177
Jumlah		327	81.704

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dasar di Kota Malang mencapai 327 lembaga dengan total siswa sebanyak 81.704 siswa. Melihat demikian banyaknya potensi pendidikan dasar di Kota Malang maka memerlukan

pengelolaan yang serius. Untuk itulah pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendidikan Kota Malang, membagi pengawasan menjadi lima wilayah pengawasan berdasarkan wilayah kecamatan. Pembagian SD berdasarkan wilayah kecamatannya dapat dilihat dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel di bawah juga dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dasar terbanyak terdapat di kecamatan Kedungkandang.

Tabel 4
Jumlah Sekolah Dasar Berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2005

No	Kecamatan	SD Negeri	SD Swasta	MI	SLB
1.	Klojen	22	22	6	1
2.	Blimbing	48	11	5	3
3.	Kedungkandang	50	6	20	-
4.	Lowokwaru	47	7	5	1
5.	Sukun	48	13	12	-
Jumlah		215	59	48	5

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang

Tabel mengenai jumlah sekolah dasar di atas menampakkan bahwa jumlah sekolah dasar negeri lebih banyak daripada jumlah jenis sekolah dasar lain, yaitu sekolah dasar swasta, MI dan SLB. Jumlah sekolah dasar terbanyak terdapat di kecamatan Kedungkandang dengan jumlah sekolah dasar negeri sebanyak 50 lembaga, swasta 6 lembaga dan MI 20 lembaga. Banyaknya jumlah lembaga pendidikan berarti juga banyaknya siswa yang sedang menempuh pendidikan di

tingkat sekolah dasar. Dalam tabel berikut dapat dilihat jumlah potensi siswa sekolah dasar pada masing-masing jenis sekolah.

Tabel 5
Jumlah Siswa Sekolah Dasar Kota Malang Tahun 2005

No	Kecamatan	Jumlah Siswa			
		SD Negeri	SD Swasta	MI	SLB
1.	Klojen	7270	5980	2749	32
2.	Blimbing	13257	2689	1100	112
3.	Kedungkandang	12875	945	3233	-
4.	Lowokwaru	11167	1844	1218	33
5.	Sukun	12962	1933	2305	-
Jumlah		57531	13391	10605	177

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat adanya perbandingan yang cukup tinggi mengenai jumlah siswa antara sekolah dasar negeri dengan jenis sekolah dasar yang lain. Tentu saja hal ini dikarenakan sekolah dasar negeri yang jumlahnya jauh melebihi jenis sekolah yang lain. Namun tentu saja keadaan ini merupakan tantangan bagi sekolah swasta dan MI untuk meningkatkan mutu pendidikannya sehingga dapat bersaing dengan sekolah negeri.

Kota Malang tidak hanya dikenal sebagai kota pendidikan dengan banyaknya lembaga pendidikan yang ada namun juga karena prestasinya di tingkat nasional,

khususnya lembaga pendidikan sekolah dasar. Beberapa prestasi siswa serta guru-guru Kota Malang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6
Data Prestasi Siswa dan Guru Kota Malang Tahun 2005

No	Nama Lembaga	Jenis Lomba	Predikat Juara
1.	Tim Kota Malang	Mata Pelajaran Tingkat	Juara 1
a.	SDN	Nasional	
	Bunulrejo		
b.	MIN		
2.	Malang I	Festifal Sains Tingkat Nasional	Juara 3
c.	SDK		
3.	St.Yusuf	Olimpiade Matematika	Juara 2
	SDN Gadang 1	Tingkat Nasional	
4.	MIN 1	Kinerja Sekolah Tingkat Nasional	Juara Harapan 1
5.		Kolase Tingkat Propinsi	Juara Harapan 1
6.	SDN Percobaan 1	Lomba Alat Peraga Sains	12 Besar
7.		Cerita Bergambar	Juara 3
8.	SDN Blimbing 3	Cerdas Cermat IPS	Juara Tingkat
	SDN Gadang 1		Nasional
9.	Guru TK Pembina	Lomba Gugus	Juara 1
10.	YPAC	Penghargaan Walikota yang peduli terhadap Pemberantasan Buta Aksara Tingkat Nasional	Penghargaan dari Presiden RI
	Gugus Sawojajar Anugerah Aksara		

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang

Prestasi-prestasi siswa serta guru Kota Malang di atas merupakan bukti bahwa pendidikan di Kota Malang tidak hanya unggul dalam kuantitas fasilitas pendidikan saja namun juga mempunyai keunggulan dalam kualitas pendidikannya. Melihat besarnya potensi pendidikan di Kota Malang maka dapat dipahami jika pemerintah kota terus berusaha meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang. Dalam usaha

meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Kota Malang telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional secara aktif termasuk Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2004-2005. Meskipun Kota Malang bukan sebagai *pilot project* namun sejauh ini telah dinilai berhasil dalam melaksanakan KBK. Hal ini diungkapkan oleh Lilik Dwi Ariyani, Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Malang dalam wawancara tanggal 17 April 2006 berikut:

“KBK mulai dilaksanakan tahun 2004 kemarin, sampai saat ini pelaksanaannya dapat dianggap berhasil, khususnya tingkat sekolah dasar. Ini dilihat dari banyaknya sekolah dari luar kota yang mengadakan studi banding ke sekolah dasar-sekolah dasar di Kota Malang.”

2. Gambaran Umum SDN Klojen II Malang

SDN Klojen II Malang terletak di Jalan Pattimura 1 Malang dan termasuk dalam wilayah kecamatan Klojen. Sekolah dasar ini termasuk kompleks SDN Klojen karena di jalan Pattimura ini terdapat tiga sekolah dasar, yaitu SDN Klojen I, SDN Klojen II, dan SDN Klojen III. Lebih jelasnya mengenai lokasi SDN Klojen II Malang dapat dilihat pada lampiran Peta Kecamatan Klojen Kota Malang.

Berdasarkan bentuk bangunan sekolah dasar ini termasuk bangunan peninggalan penjajahan Belanda, sehingga kapan tepatnya sekolah ini didirikan tidak ada yang mengetahuinya. Namun ada suatu dokumen tertulis yang menyebutkan bahwa sekolah ini didirikan kira-kira pada tahun 1897, yang pada waktu penjajahan

Belanda juga digunakan sebagai sekolah. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu guru senior di SDN Klojen II berikut:

“ Saya mengajar di sini sejak tahun 1975, namun tidak ada yang tahu kapan sekolah ini dibangun. Tapi saya pernah baca suatu dokumen, saya lupa nama dokumennya, sekolah ini merupakan peninggalan Belanda yang dibangun pada 1897. Pada saat itu bangunan ini juga digunakan sebagai sekolah dasar. Sebagian besar dari bangunan sekolah ini masih seperti bangunan aslinya, mungkin hanya bagian atap yang diganti karena sudah banyak yang bocor.” (Misini, A.Ma. Pd, 28 Maret 2006)

Selama berfungsi sebagai lembaga pendidikan dasar, SDN Klojen II Malang telah berganti nama beberapa kali, antara lain SDN Diponegoro, SDN Klojen Ledok, SDN Klojen IV, dan terakhir SDN Klojen II Malang. Luas tanah sekolah adalah 816, 89 m² dengan luas bangunan 507, 36 m² yang terdiri dari dua bangunan. Pada tahun 2003 pihak sekolah menambah bangunan tingkat dengan luas 6,5 m x 15 m, yang digunakan sebagai ruang kepala sekolah dan ruang laboratorium. Karena termasuk sekolah kompleks maka halaman sekolah dimiliki bersama antara SDN Klojen I, II, III termasuk acara upacara bendera dilaksanakan bersama.

Sebagai lembaga pendidikan SDN Klojen II Malang mempunyai visi “Terwujudnya SDN Klojen II Malang menjadi sekolah unggulan berprestasi dengan pengelolaan yang profesional yang berfokus kepada kepentingan anak didik/ siswa” sedangkan misinya adalah “membentuk anak didik berimtaq, tanggap terhadap perkembangan IPTEK, berprestasi, mandiri dan terampil”. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka diperlukan sarana dan prasarana sekolah guna mendukung

kelancaran kegiatan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar. Sarana belajar yang tersedia di SDN Klojen II Malang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7
Sarana Belajar di SDN Klojen II Malang

No	Sarana	Jumlah	Luas
1.	Ruang Kelas	6 kelas	56 m ²
2.	Kantor Kepala Sekolah	1 ruang	35 m ²
3.	Ruang Guru	1 ruang	21 m ²
4.	Laboratorium Komputer	1 ruang	24 m ²
5.	Laboratorium Bahasa	1 ruang	100 m ²
6.	Ruang Perpustakaan	1 ruang	40 m ²
7.	Laboratorium MIPA	1 ruang	24 m ²
8.	Mushola	1 ruang	150 m ²
9.	Ruang UKS	1 ruang	20 m ²
10.	Gudang	1 ruang	10 m ²
11.	Kamar Mandi Guru	1 ruang	3 m ²
12.	Kamar Mandi Murid	3 ruang	9 m ²
13.	Warung Sekolah	1 ruang	10 m ²

Sumber: Profil SDN Klojen II Malang, keadaan tahun 2005 data diolah

Sejak menyandang nama SDN Klojen II Malang, telah terjadi empat kali pergantian Kepala Sekolah. Bahkan pada tahun 2005 sempat terjadi kekosongan kepala sekolah sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang akan segera diberlakukan.

Tabel 8
Regenerasi Kepala SDN Klojen II Malang

No	Tahun	Kepala Sekolah	Keterangan
1.	1972-1982	Moedjiani	Pensiun
2.	1982-1992	Triningsih NIP. 130 640 737	Pensiun
3.	1992-2005	Suprapti, A. Ma. Pd. NIP. 130 314 789	Pensiun
4.	2005-2006	Suparti, S.Pd NIP. 130 314 738	Merangkap SDN Klojen III
5.	2006- ?	Drs. Sya'roni NIP. 130 620 900	-

Sumber: Profil dan Peta Denah SDN Klojen II Malang

Pada awal implementasi kebijakan KBK SDN Klojen II Malang dikepalai oleh Suprapti A. Ma. Pd yang kemudian memasuki masa pensiun dan tugasnya digantikan oleh Suparti, S.Pd yang juga merupakan kepala SDN Klojen III Malang. Jadi pada tahun 2005-2006 kepala SDN Klojen III merangkap menjadi kepala SDN Klojen II Malang. Hal ini terjadi karena adanya rencana merger (*regroup*) ketiga sekolah dasar tersebut. Oleh karena itu untuk sementara jabatan kepala sekolah SDN Klojen II untuk sementara dikosongkan dulu sambil menunggu realisasi kebijakan merger tersebut. Pada bulan Maret 2006, Drs. Sya'roni mulai menjabat sebagai kepala SDN Klojen I, II dan III namun kebijakan mergernya masih direalisasikan mulai tahun ajaran baru mendatang.

B. Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di SDN

Klojen II Malang.

1. Prosedur Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada Instansi Terkait

a. Prosedur Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada Dinas Pendidikan Kota Malang

Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di Kota Malang dimulai pada tahun ajaran 2004-2005, sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat mengenai kurikulum 2004. Namun sebelum diimplementasikan secara luas, pada akhir tahun 2003 Dinas Pendidikan terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan KBK. Sosialisasi tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. Sosialisasi perwilayah pengawasan. Pada tahap ini sosialisasi dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan kepada setiap kepala sekolah. Para kepala sekolah ini diberi pelatihan dan penataran yang berkaitan dengan kurikulum berbasis kompetensi.
2. Sosialisasi perwilayah kecamatan. Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap pertama, yaitu sosialisasi terhadap guru kelas. Tidak semua guru kelas mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan, namun bersifat perwakilan. Sosialisasi ini dilakukan bertahap, pada tahun 2003

guru kelas yang diberi pelatihan adalah guru kelas I dan IV, dan seterusnya.

Tahap sosialisasi tidak hanya meliputi pelaksanaan pelatihan saja namun sampai pada pemberian buku pedoman dan buku kurikulum kepada masing-masing sekolah. Pemberian bantuan berupa sarana belajar, seperti buku-buku penunjang dan alat peraga juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk mendukung implementasi kebijakan KBK.

Berdasarkan prosedur implementasinya, KBK juga diimplementasikan secara bertahap menurut jenjang pendidikan. Dimulai pada tahun ajaran 2004-2005, implementasi KBK, khususnya pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan MI, meliputi jenjang pendidikan kelas I dan kelas IV, selanjutnya pada tahun ajaran 2005-2006 kelas II dan kelas V, dan pada tahun ajaran 2006-2007 kelas III dan VI.

Dinas Pendidikan Kota Malang juga mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan KBK di lapangan (sekolah). Pemantauan dilakukan oleh pengawas wilayah kecamatan yang disebut dengan pengawas sekolah. Satu wilayah kecamatan dibagi menjadi beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri atas 4 sampai 5 pengawas. Pengawas sekolah inilah yang langsung terjun ke lapangan untuk membantu implementasi KBK di sekolah-sekolah. Selain memberikan pelatihan-pelatihan terjadwal para pengawas juga seringkali mengadakan kunjungan mendadak ke sekolah-sekolah untuk melihat sejauh mana perkembangan sekolah dalam

mengimplementasikan kebijakan pendidikan, terutama KBK. Hal ini diungkapkan oleh Lilik Dwi Ariyani, Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Malang berikut:

“ Untuk pengawasan terhadap sekolah-sekolah dibentuk pengawas sekolah. Satu wilayah pengawasan ada 4-5 orang pengawas sekolah. Pengawas sekolah inilah yang terjun langsung dalam sosialisasi KBK, baik melalui pelatihan terjadwal ataupun terjun langsung ke sekolah. Jadi pengawas sekolahlah yang tahu kondisi di lapangan secara pasti. Merekalah yang mengetahui mana sekolah yang perlu bantuan dan mana sekolah yang sudah bisa berjalan mandiri.” (Lilik Dwi Ariyani, 17 April 2006)

Pengawas sekolah juga bertanggung jawab terhadap evaluasi prestasi sekolah. Menurut Lilik Dwi Ariyani evaluasi dilakukan berdasarkan laporan nilai ujian yang diadakan persemester. Laporan inilah yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan sekolah dalam proses belajar mengajarnya.

b. Prosedur Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Pada SDN Klojen II Malang

Ketika keluar perintah pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi sebagai kurikulum 2004 serta adanya program pelatihan dari Dinas Pendidikan, maka kepala SDN Klojen II Malang segera mengambil langkah aktif. Sesuai dengan prosedur pelaksanaan maka kepala SDN Klojen II mulai mengikuti pelatihan tingkat wilayah pengawasan bersama dengan kepala SDN lain. Selanjutnya kepala sekolah mengadakan sosialisasi hasil pelatihan terhadap guru-guru SDN Klojen II Malang. Kemudian guru kelas I dan IV yang dikirim untuk mengikuti pelatihan tingkat

wilayah kecamatan. Pelatihan ini sekaligus merupakan sosialisasi mengenai pemahaman dan metode pembelajaran melalui sistem KBK.

Setelah mendapat pelatihan selama kurang lebih 3 hari, guru yang telah mengikuti pelatihan tidak langsung menerapkan pada siswanya, namun terlebih dahulu diadakan uji kelayakan terhadap guru yang bersangkutan, yaitu mengajar di sekolah lain. Ketika tahun ajaran 2004 dimulai, KBK baru diterapkan yaitu pada kelas I dan kelas IV. Pada tahun ajaran 2005-2006 KBK mulai diterapkan pada kelas II dan kelas V. Sedangkan kelas III dan VI pada tahun ajaran 2006-2007 mendatang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yuli Prihartini, yang pada tahun ajaran 2004-2005 menjabat sebagai guru kelas IV:

“Kira-kira akhir 2003, ada undangan pelatihan KBK yang diadakan Dinas Pendidikan. Saat itu pelatihan KBK dilaksanakan selama kurang lebih 3 hari dan diwajibkan bagi guru kelas I dan kelas IV. Pelatihan itu tidak hanya sekali tapi sampai beberapa kali, setelah pelatihan itu saya mengadakan pelatihan mengajar di sekolah lain untuk menerapkan metode belajar menggunakan KBK.” (Yuli prihartini, 9 Maret 2006)

Pelatihan terhadap guru kelas I dan IV ini tidak hanya berlangsung satu kali tapi lebih dari tiga kali. Sedangkan tahap-tahap berikutnya, yaitu untuk jenjang kelas II dan V, sosialisasi dan pelatihan KBK tidak lagi dilakukan oleh Dinas Pendidikan melainkan melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang diadakan setiap bulan.

2. Kesiapan SDN Klojen II Malang dalam Implementasi Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK)

a. Potensi Sumber Daya Guru dan Karyawan SDN Klojen II Malang

Implementasi KBK terkait erat dengan adanya manajemen sekolah sebagai pelaksana kebijakan di tingkat paling rendah sekaligus bersentuhan langsung dengan pelaksanaan di lapangan. Kurikulum dalam KBK yang lebih mengutamakan aspek kognitif dan psikomotorik serta lebih bersifat otonomi sekolah, membutuhkan ketersediaan sumber daya aktor pelaksana yang berkualitas. Aktor pelaksana yang sangat berperan penting adalah guru kelas, karena mereka yang terlibat langsung dengan siswa. Hal ini diungkapkan:

“ KBK menuntut guru tidak hanya belajar tapi juga memahami serta menyusun metode penyampaian pelajaran secara tepat, karena saat ini tugas guru tidak hanya sekedar menyampaikan teori melainkan lebih pada memberikan pemahaman menyeluruh mengenai suatu ilmu. Oleh karena itu kita sebagai guru harus lebih banyak belajar agar dapat melaksanakan misi KBK.” (Yuli Prihartini, 9 Maret 2006)

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kualitas sumber daya guru adalah tingkat pendidikan terakhir. Tingkat pendidikan terakhir dari guru dan pegawai SDN Klojen II Malang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 9
Pendidikan Guru dan Pegawai SDN Klojen II Malang Menurut Ijazah Terakhir

No	Nama Guru	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Status Kepegawaian
1.	Drs. Sya'roni	Sarjana Agama	Kepala Sekolah	PNS
2.	Misini, A.Ma. Pd	PGSD	Guru kelas I	PNS
3.	Dra. Yetti Indrawati	Sarjana Agama	Guru agama	PNS
4.	Nanik Sriwandini, S.Pd	Sarjana PPKn	Guru kelas V	PNS
5.	Dyah Areni, S.Pd	Sarjana Administrasi Pendidikan	Guru kelas IV	PNS
6.	Hartini, S.Pd	Sarjana Pendidikan Olah Raga	Guru olah raga	PNS
7.	Yuli Prihartini	PGSD	Guru kelas VI	PNS
8.	Pirnaning Maretsi, S. Pd	Sarjana PPKn	Guru kelas II dan agama Kristen	PNS
9.	Renaningtyas	SPG	Guru kelas III	PNS
10.	Anik Mardyaningtyas	SMK	Perpustakaan	PTT
11.	Mochammad Zainy	SMA	Guru Kesenian dan Bahasa Inggris	GTT
12.	Andika Febrianto	SMA	Guru komputer	GTT
13.	Fauzi	Sarjana Teknik Elektro	Guru Bahasa Inggris dan Lab. Bahasa	GTT

Sumber: Profil dan Denah SDN Klojen II Malang keadaan 2006

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas pendidikan terakhir guru adalah sarjana dan mengajar sesuai dengan kompetensinya, meski masih ada beberapa guru yang berpendidikan SMA atau sederajat. Hal ini dianggap bukan masalah besar karena para guru tersebut telah mengajar puluhan tahun dan memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan untuk guru tidak

tetap, tampak bahwa pendidikan akhirnya adalah sekolah menengah atas namun para guru tidak tetap ini sedang dalam proses melanjutkan studi sarjananya.

b. Potensi Sumber Daya Siswa SDN Klojen II Malang

Selain sumber daya guru, sumber daya siswa juga berperan penting dalam implementasi KBK terutama berkaitan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas. Jumlah siswa dalam satu kelas menentukan efektif tidaknya pembelajaran di dalam kelas. Metode pembelajaran dengan menggunakan KBK akan efisien jika dalam kelas terdapat maksimal 40 siswa, sehingga guru dapat memberikan perhatian secara menyeluruh. Di bawah ini adalah tabel jumlah siswa dalam setiap kelas.

Tabel 10
Jumlah Peserta Didik SDN Klojen II Malang Tahun 2005-2006

No	Asal Murid	Murid Baru		Murid Mengulang		Jumlah Murid Seluruhnya		
	Tingkat/Kelas	P	L	P	L	P	L	Jumlah
1.	Kelas I	18	20	1	-	19	20	39
2.	Kelas II	19	23	2	-	21	23	44
3.	Kelas III	27	18	-	3	27	21	48
4.	Kelas IV	22	21	2	1	24	22	45
5.	Kelas V	29	17	-	-	29	17	46
6.	Kelas VI	23	21	-	-	23	21	42

Catatan: Murid baru termasuk murid pindah masuk dan pindah keluar

Sumber: Buku Induk Siswa keadaan 2005-2006 data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir semua kelas terisi lebih dari 40 siswa. Dalam buku pedoman pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi terbitan pusat kurikulum Departemen Pendidikan Nasional pun disebutkan bahwa

kriteria sekolah pelaksana KBK adalah jumlah siswa satu kelas tidak lebih dari 40 orang. Hal ini merupakan kendala tersendiri bagi pelaksanaan metode pembelajaran KBK di dalam kelas, seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“ Berdasarkan sistem KBK jumlah siswa setiap kelas maksimal 40 siswa, tapi di sini jumlah siswa tiap kelas lebih dari 40 siswa sehingga sistem pembelajaran KBK belum bisa efektif. Guru belum bisa memberikan perhatian penuh pada setiap siswa. Tapi paling tidak kita dapat memberikan perhatian khusus pada siswa yang menunjukkan prestasi atau siswa yang membutuhkan perhatian lebih banyak.” (Yuli Prihartini, 9 Maret 2006)

Pendapat Yuli tersebut di atas memang merupakan kendala bagi keefektifan model belajar sistem KBK. Untuk mengatasinya diambil kebijakan dengan memberikan perhatiannya meskipun terbatas pada siswa yang menunjukkan kelebihan atau memerlukan perhatian yang lebih besar. Tampak kebijakan ini menunjukkan dampak yang positif, terlihat dari prestasi siswa-siswa SDN Klojen II Malang dalam lomba-lomba tingkat wilayah kecamatan maupun tingkat Kota Malang. Prestasi siswa-siswa tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 11
Data Prestasi Siswa SDN Klojen II Malang Tahun 2004-2006

No	Bulan	Prestasi	Kegiatan
1.	Maret 2004	Juara I	Lomba Tartil Qur'an tingkat Kota
2.	Mei 2004	a. Juara I Mapel PPKn/IPS b. Juara III Mapel Matematika c. Juara II Mapel Bahasa Indonesia d. Juara II Pidato Bahasa Jawa e. Juara I Pidato Bahasa Inggris	Lomba Mapel tingkat Wilayah
3.	Juni 2004	a. Juara III Mapel PPKn/IPS b. Juara II Pidato Bahasa Inggris	Lomba Mapel tingkat Kecamatan Klojen
4.	Oktober 2004	Juara III Tartil Qur'an	Gema SD Sabilillah Malang Sewindu, Tingkat Kota
5.	Maret 2004	a. Juara I Tartil Qur'an b. Juara III Qiro'ah	Lomba Agama tingkat Kecamatan Klojen
6.	Januari 2005	Juara I Atletik Putra dan Putri	Porseni tingkat Kecamatan Klojen
7.	Pebruari 2005	Juara II dan Juara III Renang	Porseni tingkat Kota tahun 2005
8.	Maret 2006	Juara III MTQ Putra Juara I Tartil Qur'an Putra Juara I Qifdul Qur'an	Lomba Pendidikan Islam KKGPAI tingkat Kecamatan

Sumber: Buku Prestasi Siswa SDN Klojen II Malang data diolah

Selain prestasi dalam lomba-lomba tersebut di atas, prestasi siswa-siswa SDN Klojen II Malang tampak pada jumlah siswa yang masuk ke SLTP negeri mencapai 90 %. Hal ini merupakan hasil dari kerja keras guru-guru dalam memberikan perhatian pada siswa-siswa. Bahkan guru-guru rela memberikan jam tambahan di luar jam pelajaran sekolah untuk memperdalam materi pelajaran. Hal ini diungkapkan oleh Yuli Prihartini dalam wawancara tanggal 9 Maret 2006.

“ Lulusan SDN Klojen II Malang yang berhasil masuk ke SLTP negeri mencapai 90 %, ini merupakan kebanggaan bagi kami. Tapi tentu saja hal itu melalui kerja keras, siswa kelas VI mendapat tambahan pelajaran di luar jam sekolah. Untungnya siswa-siswa mau bekerja sama, mereka mulai masuk pukul 6.00 dan pulang pada pukul 13.30.”

Gambaran di atas tidak sesuai dengan model pembelajaran KBK yang lebih mengutamakan pengalaman siswa dalam menggali informasi. Namun karena implementasi sistem KBK belum sampai tahap kelas VI maka model belajar tersebut masih dilaksanakan. Hal itu juga berkaitan dengan model penerimaan siswa baru di sekolah lanjutan yang masih berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN).

c. Potensi Fasilitas Pendidikan

Guna mendukung proses pembelajaran diperlukan fasilitas pendidikan seperti laboratorium, alat peraga, serta perpustakaan sebagai sumber buku-buku pendukung materi belajar. Fasilitas pendidikan di SDN Klojen II Malang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan KBK dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan.

Fasilitas pendidikan yang ada di SDN Klojen II Malang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 12
Sarana Pendukung Pendidikan

No	Sarana belajar	Jumlah	Keterangan
1.	Alat pembelajaran		
	a. Peta elektrik	1 buah	Rusak
	b. Peta	6 buah	
	c. Atlas	10 buah	
	d. Timbangan Dacin	1 buah	
	e. Alat pengukur tinggi badan	1 buah	
	f. Globe	3 buah	Gambar Pahlawan
	g. Rambu-rambu lalu lintas	1 set	
	h. Gambar-gambar		
	i. Alat peraga matematika	1 set	
2.	Laboratorium Bahasa	40 unit	Gambar organ tubuh dan pendukung materi lainnya.
3.	Laboratorium Komputer	8 unit	
4.	Laboratorium IPA		
	a. KIT IPA	3 buah	
	b. Almari KIT IPA	1 buah	
	c. Gambar-gambar		
	d. Batu-batuan	1 set	
5.	Alat olah raga		
	a. Bola Voli	2 buah	
	b. Bola Takraw	1 buah	
	c. Bola Kasti	10 buah	
	d. Kayu Pemukul	2 buah	
	e. Matras	3 buah	
	f. Holahop	6 buah	
	g. Stopwatch	3 buah	

6.	h. Peti lompat Alat Ekstrakurikuler	1 buah	
	a. Pramuka		
	Tali	5 buah	
	Pasak	20 buah	
	Tenda	1 buah	
	tongkat	10 buah	
	b. PKS	3 set	Seragam lengkap
	c. Kesenian		
	Alat musik samroh	1 set	
	Angklung	1 set	

Sumber: Profil SDN Klojen II Malang keadaan tahun 2005

Fasilitas lain yang harus dimiliki sekolah untuk mendukung implementasi KBK adalah keberadaan perpustakaan. Perpustakaan merupakan sumber informasi dan pengetahuan serta untuk menumbuhkan semangat kemandirian siswa. Berikut adalah data koleksi buku perpustakaan SDN Klojen II Malang :

Tabel 13
Koleksi Buku Perpustakaan

No	Jenis Buku	Jumlah	Judul
1.	Fiksi	255	237
2.	Non Fiksi		
	a. Buku paket lama	1600	663
	b. Buku paket baru	688	322
	c. Buku pengetahuan umum	985	681
3.	Kamus		
	a. Kamus lengkap Bahasa Indonesia	20	1
	b. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia	21	1
	c. Kamus Bahasa Indonesia-Inggris	1	1
4.	Ensiklopedia	24	24
5.	Lain-lain	315	315
Jumlah		3998	2255

Sumber: Buku Besar Perpustakaan SDN Klojen II Malang, keadaan tahun 2005 data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah buku yang ada di perpustakaan SDN Klojen II Malang berjumlah 3998 buku dengan 2255 judul. Namun untuk jenis buku paket baru jumlahnya masih relatif lebih sedikit dibandingkan jumlah buku paket lama. Buku paket lama ini merupakan buku-buku yang belum menggunakan sistem KBK. Pada kenyataannya buku-buku tersebut tidak semuanya berada di perpustakaan namun sebagian besar diletakkan di “pojok baca”.

Seperti yang diungkapkan berikut:

“ Buku yang ada di perpustakaan ini jumlahnya berkurang, sebagian telah dipindahkan ke pojok baca yang ada di setiap kelas. Jadi kalau dalam pelajaran dibutuhkan buku paket tidak perlu ke perpustakaan karena buku untuk masing-masing jenjang kelas telah disediakan di pondok baca.” (Fauzi, 17 Maret 2006)

Pojok baca merupakan perpustakaan kecil di dalam kelas. Sebagai salah satu komponen dari KBK yang berfungsi sebagai sarana kegiatan siswa di dalam kelas, pojok baca merupakan sumber bacaan siswa saat mata pelajaran menghendaki adanya sumber buku yang bervariasi. Oleh karena itulah buku-buku di perpustakaan, terutama buku paket banyak yang di alihkan ke perpustakaan kelas ini. Selain buku paket dan non fiksi, pojok baca juga berisi buku-buku fiksi atau majalah yang merupakan swadaya dari peserta didik sendiri.

d. Sumber Pendanaan Pendidikan SDN Klojen II Malang

1. Sumbangan Pembangunan bagi Siswa Baru (Sumbangan Isidental)

Tuntutan terhadap kelengkapan fasilitas belajar mengajar berdampak pada semakin tingginya kebutuhan terhadap dukungan sumber dana pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem KBK merupakan salah satu penyebab semakin mahal biaya pendidikan, seperti yang diungkapkan oleh Bendahara iuran sekolah berikut:

“ Sistem KBK membuat biaya operasional sekolah semakin tinggi, sumber pendapatan anggaran semakin tinggi dan pengeluaran pun semakin banyak. Hal ini dikarenakan kita harus membuat bahan ajar yang berupa fisik kepada siswa, seperti pajangan dan alat peraga. Oleh karena itulah biaya pendidikan semakin tinggi, hal ini merupakan dilema bagi sekolah yang tidak berani menarik dana pendidikan dari wali murid karena ada kebijakan dari pemerintah kota yang tidak memperbolehkan pihak sekolah menarik biaya pendidikan yang terlalu besar dari wali murid.” (Dra. Yetti Indrawati, 9 Maret 2006)

Berdasarkan pernyataan Dra Yetti Indrawati di atas, tampaknya pemerintah kota Malang telah mengantisipasi mahal biaya pendidikan, sehingga dikeluarkan kebijakan mengenai penarikan iuran dari wali peserta didik. Kebijakan ini tertuang dalam SK Walikota yang berisi tentang besarnya iuran pendidikan yang boleh diambil pihak sekolah dari peserta didik yang baru masuk (siswa kelas 1), yang disebut dengan sumbangan pembangunan atau Sumbangan Isidental. Berdasarkan SK Walikota tersebut SDN Klojen II Malang hanya boleh menarik iuran pembangunan sebesar Rp 500.000 kepada wali peserta didik yang diangsur selama

lima kali. Iuran ini merupakan dana bagi pengadaan fasilitas sekolah, seperti yang diungkapkan oleh Dra. Yetti Indrawati dalam wawancara tanggal 9 Maret 2006 berikut:

“ Pihak sekolah tidak bisa menarik iuran seenaknya sendiri, ada SK Walikota yang mengatur berapa besar iuran yang boleh ditarik sekolah dari wali murid. Sekolah kita diperbolehkan menarik iuran pembangunan sebesar Rp 500.000 bagi siswa baru. Dana inilah yang digunakan untuk pembangunan serta pengadaan fasilitas sekolah, karena kita tidak mendapat subsidi pembangunan gedung dari pemerintah.”

2. Program Bantuan Operasional Sekolah

Sumber dana lain yang diperoleh sekolah adalah dari bantuan pemerintah yang berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini merupakan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, setiap siswa mendapatkan bantuan sebesar Rp 19.500 perbulan atau Rp 117.500 persemester atau 235.000 pertahun. **(Juklak BOS 2005)** Pihak sekolah menggunakan dana ini untuk biaya operasional sekolah seperti pengadaan bahan ajar (pembuatan pajangan dan kreatifitas siswa), pengadaan sarana belajar sampai pada perbaikan gedung sekolah seperti pengecatan dan perbaikan atap yang bocor.

3. Iuran Siswa

Iuran sekolah merupakan pendapatan rutin anggaran sekolah dan merupakan sumber dana bagi pengeluaran sekolah. Iuran siswa tiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi wali peserta didik terbagi menurut kriteria keluarga mampu Rp 17.000, sedang Rp 7.500 dan keluarga tidak mampu atau miskin

dibebaskan dari iuran sekolah. Kriteria dan besarnya iuran siswa ditentukan oleh pihak sekolah. Jumlah siswa berdasarkan kategori mampu, sedang dan tidak mampu adalah sebagai berikut:

- a. tidak mampu : 35 siswa
- b. sedang : 214 siswa
- c. mampu : 12 siswa

Kriteria mampu atau tidak didasarkan pada pendapatan orang tua siswa. Tabel di bawah ini menggambarkan kemampuan ekonomi siswa dari masing-masing kelas.

Tabel 14
Tingkat Kemampuan Ekonomi Siswa

Kelas \ Kriteria	Tidak Mampu	Sedang	Mampu
I	3	36	-
II	8	33	2
III	8	35	5
IV	5	35	4
V	7	37	1
VI	4	38	-
Jumlah	35	214	12

Sumber: Buku Absensi Siswa tahun ajaran 2005-2006

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata orang tua siswa dalam kriteria mampu secara ekonomi. Hal ini menjadi modal yang bagus bagi kebijakan-kebijakan sekolah yang berhubungan dengan pengadaan fasilitas serta penentuan besarnya iuran sekolah yang akan ditarik oleh sekolah. Bagi 35 siswa yang tidak

mampu bebas dari kewajiban membayar iuran sekolah karena mereka telah mendapat subsidi dari dana BOS.

Sebagai bahan perbandingan pada tahun 2003 iuran sekolah yang ditarik dari siswa sebesar 23.500,00 dan pada tahun 2004 sebesar 27.400,00. Uang iuran tersebut sudah termasuk uang pembayaran laboratorium komputer.

Selain sumbangan isidental dan iuran sekolah, orang tua siswa khususnya kelas I ditarik uang pendaftaran masuk ketika anak mereka telah dinyatakan lulus tes masuk. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan salah satu orang tua siswa kelas satu, yaitu Djuni, pada wawancara tanggal 29 Maret 2006 yang menyatakan bahwa ada uang pendaftaran yang digunakan untuk pembelian seragam dan buku tulis sebesar Rp 350.000,00.

e. Dukungan Orang Tua Siswa

Implementasi KBK tidak dapat lepas dari peran serta berbagai pihak, mulai kepala sekolah, guru, siswa, karyawan sekolah serta yang juga tidak dapat ditinggalkan adalah peran serta orang tua siswa. Peran serta orang tua siswa dalam manajemen sekolah berkaitan dengan implementasi KBK adalah sebagai mitra seajar sekolah untuk menyelesaikan masalah intern sekolah secara bersama-sama.

1. Sosialisasi Kebijakan Sekolah pada Orang Tua Siswa

Selain dukungan materiil, peran serta orang tua siswa juga dibutuhkan dalam bentuk immateriil, yaitu dukungan terhadap metode belajar yang digunakan guru. Hal

ini juga terjadi pada SDN Klojen II Malang. Oleh karena itulah ketika kebijakan KBK mulai diterapkan, pihak sekolah mengadakan sosialisasi terhadap orang tua siswa agar tidak ada kesalahpahaman mengenai model belajar yang digunakan. Hal ini diungkapkan oleh Yuli Prihartini dalam wawancara pada tanggal 9 Maret 2006 berikut:

“ Begitu KBK diterapkan, pihak sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk menjelaskan model belajar yang sekarang digunakan. Jalan ini ditempuh agar tidak ada kesalahpahaman dengan orang tua siswa. Karena KBK menuntut siswa lebih mandiri, jika orang tua tidak membantu maka siswa juga tidak bisa berkembang atau nanti karena banyak tugas disangka gurunya malas.”

Tingkat pendidikan orang tua siswa mempunyai pengaruh yang besar untuk menentukan pola pikir terhadap kebijakan serta tingkat partisipasinya dalam kegiatan sekolah. Dalam tabel berikut dapat dilihat bahwa sebagian besar orang tua siswa berpendidikan tertinggi setingkat SMU.

Tabel 15
Tingkat Pendidikan Orang Tua Siswa Menurut Ijazah Terakhir

Pendidikan Kelas	SD	SLTP	SMU	Diploma	Sarjana
I	3	6	18	5	7
II	1	2	23	4	14
III	1	3	32	2	10
IV	3	4	22	-	16
V	3	4	27	3	9
VI	1	3	31	-	7

Sumber: Buku Absensi Siswa tahun ajaran 2005-2006

Pendidikan orang tua siswa yang sebagian besar pernah mengenyam bangku SMU merupakan kunggulan dalam mengimplementasikan KBK di SDN Klojen II. Karena dengan bekal pendidikan yang cukup tinggi, orang tua siswa memiliki pandangan yang terbuka terhadap paradigma pendidikan yang baru. Terlebih lagi dalam sistem KBK model belajar menuntut siswa lebih mandiri dan kreatif, dimana guru seringkali memberikan tugas rumah berupa pajangan yang berkaitan dengan tema pelajaran.

Kebijakan SDN Klojen II Malang mengenai pelaksanaan KBK berdampak positif pada pemahaman orang tua siswa terhadap perubahan model pembelajaran di sekolah. Begitu juga dengan dukungan terhadap kebijakan sekolah mengenai biaya pendidikan yang dianggap masih wajar. Dukungan ini terlihat dalam wawancara dengan salah satu orang tua murid kelas I berikut:

“ Sistem KBK membuat anak saya lebih cepat pintar, ketika saya kira dia belum bisa sesuatu ternyata dia sudah bisa melakukannya. Kami juga tidak merasa keberatan dengan PR membuat pajangan, sebagai orang tua kami membantu sebisanya. Uang pembayaran serta iuran sekolah juga tidak mahal, tidak jauh berbeda dengan sekolah lain. Kami bisa mengerti kalau sekarang biaya sekolah mahal, tapi kalau mau anak pintar maka harus berani berkorban.” (Djuni, 29 Maret 2006)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa SDN Klojen II Malang memperoleh dukungan penuh dari orang tua murid untuk menjalankan kebijakan pendidikannya, baik dari segi model belajar maupun segi iuran sekolah. Untuk iuran sekolah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kebijakan sekolah adalah menarik

iuran sekolah berdasarkan kemampuan orang tua siswa. Secara ekonomi orang tua siswa SDN Klojen tergolong berkecukupan jika dilihat dari jenis pekerjaan mereka.

Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 16
Pekerjaan Orang Tua Siswa

Kelas	PNS	Swasta	Wiraswasta	TNI-Polri	Pensiun
I	9	17	6	6	1
II	8	24	6	3	2
III	17	23	5	3	-
IV	9	15	14	6	1
V	12	21	6	6	1
VI	5	6	10	9	2
Jumlah	60	106	47	33	7

Sumber: Buku Absensi Siswa tahun ajaran 2005-2006

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar pekerjaan orang tua siswa adalah swasta. Untuk menentukan kriteria mampu atau tidak dilihat berdasarkan pendapatan orang tua siswa. Berdasarkan kriteria tersebut baru ditentukan besarnya iuran sekolah yang wajib dibayar oleh masing-masing siswa.

2. Paguyuban Kelas

Partisipasi orang tua siswa sangat diperlukan dalam pelaksanaan KBK di sekolah. Hal inipun disadari oleh manajemen SDN Klojen II Malang, karena tanpa partisipasi mereka kebijakan sekolah tak bisa berjalan lancar. Untuk itulah dibentuk perkumpulan orang tua siswa dari masing-masing kelas yang disebut Paguyuban Kelas. Perkumpulan ini berfungsi sebagai wadah komunikasi antara sekolah dengan

orang tua siswa serta untuk membantu kegiatan yang diadakan sekolah tapi dalam lingkup kelas, yaitu pengadaan fasilitas kelas serta perbaikan sarana yang rusak seperti perbaikan atap yang bocor. Diadakannya paguyuban kelas ini selain untuk memberikan wadah terhadap aspirasi orang tua siswa juga untuk menghindari iuran sekolah yang terlalu besar. Dengan adanya paguyuban ini orang tua siswa menjadi mengerti kondisi sekolah sehingga jika diminta bantuannya tidak ada kesalahpahaman. Seperti yang diungkapkan oleh Dra. Yetti Indrawati dalam wawancara tanggal 9 Maret 2006 berikut ini:

“Iuran sekolah kita seperti yang tercantum dalam anggaran sekolah, yaitu Rp 17.000 dan Rp 7.500 dan ditambah dengan dana BOS. Padahal biaya operasional sekolah sangat besar, untuk itulah dibentuk paguyuban kelas yang fungsinya membantu masing-masing kelas dalam hal fasilitas termasuk perbaikan atap yang bocor. Pengelolaan paguyuban itu diserahkan pada orang tua siswa, terserah bagaimana kebijakan mereka dalam membantu, pihak sekolah tidak ikut campur.”

Paguyuban kelas merupakan bentuk keswadayaan sekolah dalam mengelola sekolah, meskipun pada dasarnya memperbesar partisipasi orang tua siswa. Namun pada kenyataannya tidak semua paguyuban kelas membantu secara aktif dalam pengadaan fasilitas kelas. Contoh dari paguyuban kelas yang berperan aktif adalah paguyuban kelas I. Dalam paguyuban kelas ini orang tua siswa mempunyai kesepakatan untuk membayar uang iuran paguyuban. Hal ini diungkapkan oleh Asnih, orang tua siswa kelas I yang mengatakan bahwa selain iuran siswa yang

dibayar tiap bulan ada iuran paguyuban kelas sebesar Rp 5000, 00 yang digunakan untuk mengadakan perangkat kelas seperti pajangan dan perbaikan kelas.

3. Dewan Sekolah

Pembentukan dewan sekolah bertujuan untuk mempercepat jalannya pendidikan yang berkualitas agar penyelenggaraan sekolah bisa dikontrol, diberi pertimbangan, dukungan sekaligus sebagai mediator antara guru dengan siswa. Kontrol yang baik dari orang tua siswa terhadap kebijakan yang diambil diharapkan berdampak pada kemajuan. Tidak terkecuali mengenai biaya pendidikan, pihak sekolah selalu melibatkan orang tua siswa sebelum mengambil kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Partisipasi dan aspirasi orang tua siswa ini diwujudkan dalam Dewan Sekolah yang mempunyai fungsi sebagai perantara sekolah dengan orang tua siswa dan merupakan bagian dari manajemen KBK seperti yang tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan KBK.

Dewan sekolah mengadakan pertemuan dua kali dalam setahun, yaitu ketika awal tahun ajaran baru dan akhir tahun ajaran. Pertemuan awal tahun ajaran digunakan sebagai sosialisasi rencana tahunan sekolah serta penentuan besarnya sumbangan isidental bagi siswa baru. Sedangkan pertemuan akhir tahun ajaran sebagai pertanggungjawaban anggaran pendidikan selama satu tahun. Hal ini diungkapkan berikut:

“Dewan sekolah berfungsi sebagai perantara sekolah dengan orang tua siswa, terutama mengenai rencana anggaran pendidikan. Pertemuan dewan sekolah minimal diadakan dua kali dalam setahun yaitu ketika awal tahun untuk musyawarah menentukan besarnya sumbangan isidental siswa baru dan akhir tahun untuk laporan pertanggungjawaban terhadap anggaran pendidikan.” (Nanik Sriwandini, S. Pd., 29 Maret 2006)

3. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di SDN Klojen II Malang

Tujuan implementasi KBK adalah peningkatan mutu pendidikan nasional, sejalan dengan tujuan tersebut maka SDN Klojen II Malang sebagai lembaga pendidikan sekolah dasar bertanggung jawab terhadap mutu lulusan sekolah dasar. Oleh karena itulah seiring implementasi KBK maka terjadi perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan mereka.

a. Pembaharuan sistem kegiatan belajar mengajar

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan model pendidikan yang berusaha untuk mengubah pola pembelajaran behavioralistik menuju konstruktivistik. Penilaian belajar yang semula menggunakan acuan norma yaitu peserta didik dibandingkan dengan prestasi kelompok berubah menjadi acuan menggunakan standar dimana siswa tidak dibandingkan antara satu dan lain tetapi dengan menggunakan suatu standar yang telah ditetapkan. Adapun standar nilai yang berlaku di SDN Klojen II Malang adalah nilai 7,5 untuk aspek psikomotorik, afektif dan kognitif. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Yuli Prihartini pada wawancara tanggal 9 Maret 2006:

“ Dalam KBK siswa tidak lagi dipandang sama rata artinya kalau yang satu bisa maka yang lain juga bisa, melainkan lebih menghargai kemampuan siswa dalam menangkap pelajaran yang diberikan. Pada dasarnya setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda, ada siswa yang mudah paham dengan hanya mendengarkan guru menerangkan tapi juga ada siswa yang tidak bisa hanya mendengarkan saja tetapi harus sambil membaca atau diberi contoh soal dulu. Untuk itulah guru harus jeli terhadap kemampuan siswa itu, sehingga diperlukan standar nilai untuk menilai sampai dimana pemahaman siswa terhadap pelajaran. Standar nilai yang digunakan di sini adalah 7,5 untuk aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif.”

Pembaharuan sistem belajar mengajar di SDN Klojen II Malang dilakukan menurut dua langkah, yaitu:

1. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran meliputi dua hal yaitu penyusunan bahan ajar dan pelaksanaan pembelajaran dalam kelas.

a. Penyusunan Bahan Ajar

Penyusunan bahan ajar dilakukan oleh masing-masing guru kelas setiap pergantian semester dengan dilengkapi perangkat pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Meskipun tidak ada tim khusus untuk melakukan penyusunan dalam proses ini seringkali terjadi diskusi antar guru untuk menentukan perangkat pembelajaran apa yang sesuai dengan tema belajar. Bahkan guru-guru sering bertukar pengalaman atau pendapat individu siswa yang dianggap memiliki kekurangan sehingga ditemukan jalan keluar untuk membantu siswa dalam mencapai target belajar.

b. Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kelas

Pembelajaran dalam kelas dilakukan dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok. Siswa terlebih dahulu melakukan kerja kelompok dan mengambil kesimpulan tentang tema tertentu baru kemudian dilakukan pembahasan oleh guru. Untuk membantu pelajaran dalam kelas, tema-tema yang sulit dilakukan pada waktu jam sekolah seperti kunjungan ke tempat-tempat umum seperti museum dan stasiun dijadikan pekerjaan rumah. Selain itu karena selama ini tolak ukur KBK adalah kreatifitas siswa maka tema pelajaran diwujudkan dalam sebuah pajangan hasil kreatifitas siswa. Pajangan ini kemudian dipasang di setiap kelas.

2. Pelaksanan Penilaian dan Laporan Hasil Belajar

a. Pelaksanaan pembelajaran tuntas dan program pengayaan

Pelaksanaan pembelajaran tuntas dilakukan dengan menentukan batas ketuntasan untuk setiap kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran, batas ketuntasan ini didasarkan pada waktu belajar, misalnya untuk ketuntasan satu kompetensi dasar ditetapkan dalam 3 kali pertemuan, maka dalam waktu tersebut siswa dianggap mampu melakukan kompetensi dasar yang dilakukan. Jika ada siswa yang belum tuntas maka dilaksanakan program remedial sebanyak 2 kali.

b. Sistem pengelolaan dan pengolahan hasil penilaian belajar

Hasil belajar siswa ditentukan berdasarkan hasil penilaian kelas dan ulangan berkala. Elemen nilai yang digunakan untuk penilaian kelas meliputi kerja kelompok (keaktifan siswa dalam kelompok), pekerjaan rumah, tugas dan ulangan harian.

c. Pelaporan hasil belajar

Pelaporan hasil belajar dilakukan dua kali dalam setahun yaitu setiap semester yang berupa Laporan Hasil Belajar Akhir Semester (Raport akhir semester).

b. Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Pendidikan

Peningkatan mutu kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)

Kepala sekolah mempunyai Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) sebagai tempat pertemuan para kepala sekolah. Pertemuan K3S diadakan sekali dalam setiap bulannya yang selain sebagai tempat pertemuan para kepala sekolah juga berfungsi sebagai tempat pelatihan.

2. Kelompok Kerja Guru (KKG)

Guru mempunyai Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai tempat pelatihan serta pertukaran informasi serta pengetahuan antar guru-guru. KKG dibagi menjadi dua yaitu KKG wilayah pengawasan dan KKG Kecamatan. KKG wilayah

pengawasan terdiri atas 8 sekolah sedangkan KKG Kecamatan bisa lebih dari 40 sekolah.

3. Kegiatan Workshop dan Pelatihan

Kegiatan workshop merupakan agenda tetap setiap tahun. Dalam workshop ini akan dibahas mengenai metode-metode pembelajaran yang tepat dan efektif. Selain workshop, kepala sekolah dan guru juga sering dikirim untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan kota maupun propinsi.

c. Peningkatan Mutu Siswa

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat lepas dari mutu sumber daya siswa itu sendiri. Oleh karena untuk mendukung mengetahui potensi dan kompetensi siswa SDN Klojen II Malang sering mengadakan kegiatan yang memacu kreatifitas serta mengirim siswa-siswa untuk mengikuti lomba-lomba. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. Kegiatan gelar seni dan prestasi. Kegiatan ini meliputi mengikutkan siswa pada lomba-lomba tingkat sekolah dasar. Demikian diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman serta dapat diketahui potensi siswa.
2. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Untuk memperingati hari besar nasional dan hari besar islam SDN

Klojen II Malang mempunyai program rutin yang meliputi mengadakan kegiatan-kegiatan peringatan serta lomba-lomba intern sekolah.

3. Kegiatan persami pramuka sekali dalam setahun. Pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler sekolah sehingga agar tidak hanya sebagai formalitas maka diadakan persami sebagai kegiatan pelatihan kemandirian siswa.
4. Kegiatan penjelajahan pramuka selama setahun. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan persami. Penjelajahan meliputi kunjungan ke tempat-tempat bersejarah dalam Kota Malang seperti museum Brawijaya dengan berjalan kaki.
5. Lomba siswa teladan, pidato seni tari, lukis, musik, olah raga senam, atletik dan permainan

Keseriusan upaya peningkatan mutu pendidikan di SDN Klojen II Malang dapat dilihat berdasarkan anggaran bagi pengembangan pendidikan. Berikut adalah anggaran peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar (KBM) serta kreatifitas siswa. Anggaran yang ditampilkan adalah tahun 2004 dan 2005 karena dua tahun terakhirlah KBK mulai dilaksanakan. Pada kedua tahun anggaran tersebut terdapat perbedaan yaitu mengenai sumber dana. Tahun 2004 anggaran pendapatan diperoleh dari iuran sekolah saja sedangkan pada tahun 2005 anggaran pendapatan diperoleh dari iuran sekolah dan dana BOS. Penyajian data anggaran di bawah ini terbatas pada kebutuhan pembahasan.

Tabel 17
 Anggaran Peningkatan Mutu KBM SDN Klojen II Malang
 Tahun 2004 dan 2005

Kode	Tahun/Kegiatan	Jumlah
3	Tahun 2004	
	1. Pemeliharaan sarana Laboratorium dan kegiatan prestasi sekolah	2.161.000
	2. Perpustakaan	1.200.000
	3. Kegiatan Kepramukaan	1.200.000
	4. Kegiatan Olah raga	900.000
	5. Kegiatan Keagamaan/PHBI	400.000
	6. Kegiatan Seni	400.000
	7. UKS, dana sehat	2.475.000
	8. Gizi murid	2.400.000
	9. KKG/KKKS	1.000.000
	10. Koran dan MPA	180.000
	11. Piagam siswa berprestasi kenaikan kelas	200.000
	12. Pengadaan Bahan habis pakai	2.400.000
	13. Kegiatan sosial	2.200.000
	Jumlah	17.116.000

Tahun 2005		
2.	Pengadaan buku pelajaran, perpustakaan, majalah anak	8.304.500
	Kegiatan Siswa	
1.	Persami Pramuka sekali dalam setahun	1.500.000
2.	Penjelajahan pramuka sekali dalam setahun	750.000
3.	Lomba siswa teladan	300.000
4.	Lomba mata pelajaran	800.000
5.	Lomba pidato	500.000
6.	Lomba seni tari, lukis, musik	1.000.000
7.	Lomba olah raga	1.400.000
8.	Kegiatan sosial	1.200.000
9.	Makanan sehat untuk siswa	3.132.000
10.	Gelar seni dan Prestasi	2.400.000
11.	Peringatan Hari Besar Nasional	1.000.000
12.	Peringatan Hari Besar Islam	1.000.000
13.	Pondok Romadhon	400.000
14.	Dana Sehat dan UKS	2.350.000
3.	Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan	
1.	Kegiatan KKG	600.000
2.	Kegiatan K3S	300.000
3.	Kegiatan workshop	926.000
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.270.000
Jumlah		30.782.500

Sumber: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun 2004-2005

4. Kendala yang dihadapi oleh SDN Klojen II Malang dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

a. Kendala Intern yang dihadapi SDN Klojen II Malang dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

1. Keterbatasan dana operasional pendidikan yang dimiliki sekolah.
2. Keterbatasan tenaga profesional (guru) yang dimiliki sekolah.
3. Kualitas sarana dan prasarana belajar yang belum memadai.
4. Kebiasaan guru mengajar serta siswa belajar menggunakan pembelajaran konvensional.
5. Siswa belum dapat mandiri dalam menggali informasi.
6. Keterbatasan kemampuan guru mengobservasi kemampuan individual siswa dalam satu kelas karena jumlah siswa yang tidak memenuhi syarat.

b. Kendala Ekstern yang dihadapi SDN Klojen II Malang dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

1. Pandangan masyarakat umum yang berorientasi pada standar nilai.
2. Masih digunakannya standar nilai dalam mengukur prestasi siswa. Sistem ujian dan standar kelulusan yang masih menggunakan standar nilai NUN merupakan motivasi bagi guru untuk mengejar nilai kelulusan yang tinggi.

3. Sistem penerimaan murid baru di jenjang pendidikan yang lebih tinggi belum menggunakan standar kompetensi melainkan masih menggunakan standar nilai.
- c. Alternatif penyelesaian yang dilakukan SDN Klojen II dalam mengatasi kendala implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
 1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia.
 2. Mengadakan pertukaran pikiran antar guru serta terus mengasah kemampuan mengajar menggunakan model pembelajaran KBK.
 3. Berusaha memberikan perhatian terhadap setiap siswa untuk mengetahui potensi diri siswa, terutama siswa yang membutuhkan perhatian lebih dalam menerima pelajaran.
 4. Karena standar penilaian yang berorientasi nilai (NUN) maka perhatian utama masih tertuju pada pencapaian nilai namun aspek kognitif siswa tetap mendapat perhatian.

BAB V

ANALISIS

A. Model Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional yang dirasa telah tertinggal dari mutu pendidikan negara-negara lain. Melihat bagaimana kebijakan KBK ini dirumuskan, dimana pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sebagai perumus kebijakan (*policy maker*), maka dikatakan bahwa KBK merupakan kebijakan yang bersifat *top-down*. Untuk itulah dalam melakukan analisis implementasi kebijakan KBK penulis akan menggunakan model Kerangka Analisis Implementasi Kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier.

1. Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan

Rumusan kebijakan KBK menggunakan model penetapan standar kompetensi bagi siswa-siswa sekolah. Setiap jenjang pendidikan memiliki standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap lulusannya. Sebagai pemerintah pusat dalam bidang pendidikan, Depdiknas bertugas menetapkan standar kompetensi serta kurikulum bagi setiap jenjang pendidikan tersebut. Selanjutnya pengembangan serta metode

pembelajaran diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah dan sekolah yang bersangkutan.

Kebijakan KBK yang bersifat *top-down* melibatkan sejumlah birokrasi pendidikan terkait dengan Depdiknas sebagai *policy maker*. Kelebihan dari kebijakan yang bersifat *top-down* adalah pemerintah dapat memberikan monitoring melalui jalur birokrasi yang terlibat dalam proses implementasi sehingga masalah-masalah implementasi dapat dikendalikan. Kesukaran-kesukaran teknis dalam proses implementasi dapat dikendalikan melalui perumusan kebijakan yang terstruktur pada masing-masing jenjang birokrasi, yaitu depdiknas, dinas pendidikan propinsi dan dinas pendidikan kota hingga implementasi sampai pada sekolah sebagai kelompok sasaran. Depdiknas sebagai *policy maker* dapat mendelegasikan implementasi kebijakan kepada dinas-dinas terkait yang berada di daerah, yaitu Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kota. Didukung oleh hubungan koordinasi yang bersifat pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan di daerah kepada depdiknas maka masalah-masalah yang dihadapi dapat diketahui dan dikendalikan. Kesulitan-kesulitan implementasi yang bersifat teknis dapat diminimalisir melalui model implementasi KBK yang bertahap serta pemberian sosialisasi terhadap kalangan akademisi baik secara terpusat maupun di daerah.

Implementasi kebijakan KBK menghendaki adanya perubahan dalam sistem pembelajaran nasional yang lebih berorientasi pada kemandirian siswa dalam

menggal informasi. Dunia pendidikan Indonesia membutuhkan perubahan pembelajaran dari model konvensional yang lebih berorientasi pada teoritis menuju pembelajaran modern yang berorientasi pada pengalaman praktis. Melalui perubahan tersebut mutu pendidikan nasional tidak lagi hanya bersifat teoritis saja yang terbukti tidak mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia dalam persaingan global.

2. Kemampuan Kebijakan untuk Menstrukturkan Proses Implementasi

Implementasi KBK yang melibatkan jenjang birokrasi pendidikan mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah memunculkan adanya prosedur tahap-tahap implementasi yang harus dilalui kebijakan KBK untuk dapat menyentuh pelaksanaan di lapangan yaitu tingkat sekolah. Keberadaan prosedur dan tahap implementasi serta didukung oleh garis kewenangan yang jelas mempermudah kebijakan KBK untuk menstruktur secara tepat pada setiap jenjang birokrasi yang dilewati.

Tujuan dilaksanakannya KBK adalah merubah sistem pembelajaran yang dirasa tidak lagi sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan internasional yang mengakibatkan mutu pendidikan nasional semakin tertinggal dari negara-negara lain. Oleh karena itulah perlu diadakan suatu pembelajaran modern yang kemudian diwujudkan dalam sistem KBK. Hal ini sesuai dengan misi penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu menuju masyarakat madani, dalam bidang pendidikan

penyelenggaraan organisasi pelaksanaan pendidikan yang otonom, luas namun adaptif dan fleksibel, bersifat terbuka dan berorientasi pada keperluan dan kepentingan bangsa, perimbangan wewenang dan partisipasi masyarakat berkembang secara alamiah, pendidikan mampu menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang berwawasan global, memiliki komitmen nasional dan bertindak secara lokal menuju keunggulan, serta menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat peradaban. Untuk merealisasikan tujuan ini pemerintah telah memberikan memberikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Alokasi dana pendidikan yang dianggarkan pemerintah dalam APBN sebesar 20% tersebut digunakan bagi pelaksanaan pendidikan secara umum bukan dikhususkan bagi implementasi KBK. Sistem pembelajaran KBK yang membutuhkan sumber daya pendukung yang cukup besar tidak mendapat perhatian khusus dalam perumusan kebijakannya. Melainkan lebih sebagai tanggung jawab daerah dan sekolah sebagai implementor. Hal ini berkaitan dengan isu otonomi yang sedang berkembang dalam pemerintahan kita. Padahal dalam implementasinya, KBK sangat membutuhkan dukungan sumber daya keuangan yang sangat besar berkaitan dengan model belajar yang lebih berorientasi pada kegiatan praktis.

3. Variabel di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi

Perkembangan dunia pendidikan tidak pernah lepas dari perkembangan sosial masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan pembenahan terhadap dunia pendidikan nasional seiring dengan bergulirnya tuntutan globalisasi. Oleh karena itulah kebijakan pendidikan nasional ini tidak dapat lepas dari pengaruh-pengaruh sosial maupun politik dalam masyarakat. Bergulirnya isu otonomi daerah memberikan pengaruh kuat pada pelaksanaan KBK sebagai sistem pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemandirian dalam otonomi.

Penggunaan model belajar tradisional yang telah digunakan selama ini membuat siswa terlena dalam model belajar pasif dimana sumber informasi hanya diperoleh dari guru. Sedangkan guru terbiasa dengan model belajar ceramah serta berpedoman pada buku pelajaran memerlukan waktu penyesuaian dengan model belajar KBK yang bersifat belajar dari kehidupan bukan teori. Kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar masih berada pada pemulihan dari krisis ekonomi berdampak pada pengabaian terhadap kebutuhan penguasaan teknologi modern. Masyarakat cenderung lebih berkonsentrasi pada usaha pemenuhan kebutuhan hidup yang dirasakan semakin sulit sehingga sampai saat ini dimana kehidupan dunia telah berbasis teknologi, masyarakat kita masih berkuat dengan kehidupan konvensional mereka, termasuk dalam memandang sistem belajar. Dalam pandangan masyarakat

pendidikan di sekolah adalah belajar di dalam kelas dengan guru dan buku sebagai media utama.

Dinas pendidikan kota yang dalam salah satu fungsinya disebutkan mengenai fungsi peumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan bertanggung jawab terhadap kelangsungan implementasi kebijakan KBK di wilayah kota. Dalam konteks tersebut dinas pendidikan kota bertugas mendampingi sekolah dalam proses implementasi kebijakan termasuk memberikan fasilitas pendukung implementasi kebijakan. Namun realitas di lapangan mengatakan bahwa pemerintah daerah dan dinas pendidikan kota belum mampu bertindak sebagai fasilitator implementasi seperti yang dibutuhkan. Terbukti dengan tindakan yang diambil dalam rangka implementasi KBK di Kota Malang, Dinas pendidikan Kota Malang hanya berfungsi sebatas pada penyelenggaraan pelatihan dan pengadaan buku pedoman pelaksanaan KBK. Sedangkan fungsi pengawasan dan pendampingan tidak dapat berjalan sempurna dan lebih bersifat tekanan.

4. Proses Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada SDN Klojen II Malang

Di Kota Malang implementasi KBK yang dimulai pada tahun ajaran 2004-2005 pada masing-masing jenjang pendidikan terkait. Sesuai dengan prosedur implementasinya maka pada tahun 2003 telah diadakan sosialisasi serta pelatihan

model pembelajaran KBK kepada sejumlah guru kelas I dan IV SD, kelas I SLTP dan kelas I SMU. Pada pelatihan ini dikenalkan perubahan metode pembelajaran dengan menggunakan model KBK dengan berpedoman pada pedoman pelaksanaan KBK yang telah diterbitkan oleh Depdiknas. Dengan demikian secara teknis implementasi KBK di Malang sama dengan implementasi KBK di kota-kota lain.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Malang, SDN Klojen II Malang sebagai salah satu kelompok sasaran kebijakan KBK mulai mengimplementasikan KBK pada tahun ajaran 2004-2005. Prosedur implementasi didahului oleh keikutsertaan kepala sekolah serta guru kelas I dan IV dalam pelatihan KBK yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Malang pada akhir tahun 2003. Melalui pelatihan inilah kepala sekolah dan guru dibekali mengenai metode pembelajaran KBK serta manajemen sekolah dalam rangka implementasi KBK.

Sebelumnya implementasi KBK telah dilaksanakan oleh sejumlah sekolah yang ditunjuk sebagai *pilot project*. Sayangnya di Kota Malang tidak ada yang lembaga sekolah yang ditunjuk sebagai *pilot project*. Pada umumnya sekolah yang ditunjuk sebagai *pilot project* adalah sekolah yang dikenal memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dibanding sekolah lain. Hal inilah yang menurut penulis tidak sesuai untuk diterapkan. Sekolah yang memang telah memiliki kualitas pendidikan tentu memiliki modal yang cukup baik untuk mengimplementasikan KBK, padahal jika tujuannya adalah peningkatan mutu pendidikan maka akan lebih

tepat jika *pilot project* dilakukan pada sekolah-sekolah yang berkualitas kurang. Dengan demikian akan tampak hasil yang sebenarnya telah dicapai oleh sistem pembelajaran KBK.

Pelatihan dipandang sebagai langkah yang tepat bagi sosialisasi KBK. Oleh karena itulah pada tahap implementasi pertama, pelatihan diadakan sampai lebih dari tiga kali. Sayangnya pada tahap-tahap selanjutnya pelatihan hanya dilakukan satu kali saja selanjutnya lebih dipercayakan pada kegiatan kelompok kerja guru (KKG) dan kelompok kerja kepala sekolah (KKKS). Tentu saja hal ini merupakan kelemahan bagi implementasi KBK karena guru yang mengikuti pelatihan pada tahap kedua tidak mendapat pemahaman yang mendalam mengenai metode pembelajaran dalam KBK.

Pada bab penyajian data sebelumnya telah disajikan data mengenai sumber daya pendukung implementasi KBK yang dimiliki oleh SDN Klojen II Malang yang meliputi sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, serta dukungan orang tua siswa. Sarana dan prasarana pendukung belajar di SDN Klojen secara kuantitas dapat dikatakan memadai namun secara kualitas sarana dan prasarana tersebut belum mampu mendukung kegiatan belajar mengajar yang berbasis kompetensi. Contohnya saja keberadaan laboratorium komputer yang hanya terdiri atas 8 unit komputer digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang

setiap kelasnya diisi oleh minimal 39 siswa. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dilihat ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan kemampuan sekolah.

Kualitas sumber daya siswa SDN Klojen II Malang cukup mendukung terhadap perubahan sistem belajar. Namun berdasarkan kuantitas siswa dalam satu kelas yang terisi lebih dari 40 siswa merupakan kendala bagi pelaksanaan monitoring oleh guru. Dengan jumlah murid yang terlalu besar pengawasan guru menjadi kurang efektif. Sehingga guru hanya mampu memberikan perhatian pada sebagian siswa yang dianggap memerlukan bantuan lebih besar serta siswa yang menunjukkan prestasi yang menonjol. Kurangnya tenaga profesional serta fasilitas kelas yang belum mencukupi membuat kebijakan ini dipandang sebagai alternatif pilihan dari kendala tersebut. Sedangkan kelemahannya adalah kompetensi setiap siswa tidak dapat termonitoring secara sempurna.

Perbandingan guru serta siswa yang tidak seimbang menyebabkan model KBK tidak dapat terimplementasikan secara sempurna. Guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperhatikan potensi masing-masing siswa. Kegiatan belajar yang seharusnya berbasis pada kegiatan praktis juga mengalami hambatan. Akibatnya sebagai tolak ukur pelaksanaan KBK hanya berdasarkan pajangan hasil kreatifitas siswa yang merupakan tugas rutin (pekerjaan rumah) dari guru. Sedangkan tingkat kompetensi siswa masih berdasarkan nilai tes dan ujian tertulis.

Model pembelajaran KBK yang berbasis individu menuntut siswa untuk aktif menggali informasi dari berbagai sumber pengetahuan, termasuk buku. Keberadaan pojok baca pada masing-masing kelas merupakan upaya untuk meningkatkan minat baca siswa. Dengan adanya pojok baca ini kegiatan belajar lebih bervariasi karena sumber informasi tidak hanya berasal dari buku paket saja. Sayangnya keberadaan pojok baca ini telah sedikit melumpuhkan keberadaan perpustakaan sekolah karena buku-buku yang ada di perpustakaan dipindah ke pojok baca.

Sarana pendukung lain yang juga tidak dapat lepas dari implementasi KBK dan merupakan elemen penting bagi kesuksesan implementasi KBK adalah sumber dana bagi operasional sekolah. Sejak tahun 2005 lalu pemerintah telah memberikan bantuan dana operasional sekolah yang diwujudkan dalam Bantuan Operasional sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membantu sekolah dalam bidang keuangan. Dana BOS diberikan kepada sekolah dengan berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki, jadi setiap siswa memperoleh bantuan dari pemerintah. Dengan kata lain dana BOS merupakan bentuk bantuan kepada siswa untuk membayar iuran sekolah yang sering kali membuat biaya sekolah semakin mahal.

Kebutuhan implementasi KBK yang semakin besar membawa dampak pada semakin besarnya kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Tampaknya hal inilah yang membuat SDN Klojen II Malang tetap menarik iuran sekolah dari siswa, karena bantuan pemerintah tidak menutupi anggaran belanja sekolah.

Kebijakan ini tidak bertentangan dengan kebijakan pemberian BOS, karena dalam juklak BOS dikatakan sekolah penerima dana bantuan BOS dapat tetap menarik iuran sekolah. Namun untuk menghindari semakin mahalnya biaya pendidikan yang memberatkan orang tua siswa maka diambil alternatif penyelesaian penyesuaian iuran sekolah bagi masing-masing siswa. Penyesuaian tersebut tampak pada penetapan kategori kemampuan ekonomi orang tua siswa, yaitu kategori mampu dengan iuran sekolah sebesar Rp 17.000,00 persiswa perbulan, kategori sedang dengan iuran sekolah sebesar Rp 7.500,00 persiswa perbulan dan kategori tidak mampu dibebaskan dari iuran sekolah. Kebijakan ini bertujuan agar tidak ada lagi siswa yang putus sekolah karena biaya pendidikan yang mahal.

Kebijakan SDN Klojen II Malang mengenai iuran sekolah merupakan langkah tepat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar. Hal ini berkaitan dengan implementasi KBK yang membutuhkan dukungan dana yang besar serta telah meningkatkan kebutuhan dana operasional sekolah. Terbukti dengan adanya kenaikan iuran sekolah sejak dilaksanakannya kurikulum berbasis kompetensi pada SDN Klojen II Malang. Tahun 2003 iuran sekolah yang ditarik dari setiap siswa sebesar Rp 23.500,00,00 menjadi Rp 27.400,00 pada tahun 2004. Sedangkan pada tahun 2005 iuran bagi siswa mampu sebesar Rp 17.000,00 dan bagi kategori sedang sebesar Rp 7.500,00 dan nol bagi siswa tidak mampu. Untuk mengetahui perubahan anggaran pendapatan SDN Klojen II Malang dapat dilihat pada tabel 18.

Sejak tahun ajaran 2005 lalu SDN Klojen II Malang tidak lagi dapat menentukan jumlah sumbangan isidental bagi siswa baru sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan kebijakan yang berisitentang keputusan penarikan biaya tersebut bagi masing-masing sekolah. Meskipun tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk memperkecil kesempatan sekolah bertindak sesuka hati dalam menentukan biaya pendidikan, pada kenyataannya kebijakan ini justru dapat melahirkan kecemburuan sosial diantara sekolah-sekolah yang ada. Keadaan ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang menentukan besarnya iuran berbeda antara yang satu dengan yang lain. Penentuan besar kecilnya sumbangan isidental ini didasarkan pada kebutuhan sekolah, dimana besar kecilnya manajemen sekolah menjadi penentunya. Tentu saja keadaan ini pada akhirnya akan menuju pada kondisi dimana sekolah yang bagus akan semakin bagus sedangkan sekolah yang biasa akan tetap biasa-biasa saja.

Upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar, khususnya di SDN Klojen II Malang, yang dilaksanakan melalui model belajar berbasis kompetensi masih belum dapat tercapai sepenuhnya. Hal ini terlihat dari sistem belajar mengajar belum menampilkan model belajar KBK yang sesungguhnya meskipun telah dilakukan perubahan. Tampak pada kegiatan belajar yang masih sulit meninggalkan model belajar konvensional, kegiatan belajar siswa yang belum berbasis kegiatan praktis dan masih sulit meninggalkan model pembelajaran konvensional yang berbasis materi,

guru masih cenderung mengutamakan nilai ujian siswa dalam mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar, sistem evaluasi yang berdasarkan hasil tes serta monitoring guru yang belum maksimal dalam menilai kompetensi masing-masing siswa. Dalam agenda sekolah memang terdapat usaha peningkatan mutu sumber daya warga sekolah namun belum diikuti oleh usaha peningkatan fasilitas pendidikan yang tersedia. Sehingga upaya peningkatan mutu pendidikannya terkesan tidak efektif. Padahal jika dilihat berdasarkan input, proses dan output pendidikan, SDN Klojen II Malang memiliki potensi yang cukup bagus.

Keterbatasan fasilitas ini sangat riskan dalam proses pendidikan yang menggunakan model pembelajaran KBK yang penuh dengan pembelajaran praktis. Keberadaan fasilitas pendukung seperti ruang kelas yang kondusif, perpustakaan dan laboratorium tidak lagi sebagai sarana pelengkap namun telah menjadi alat belajar utama. Bahkan di SDN Klojen II Malang belum terdapat sarana komunikasi dan informasi yang berbasis teknologi seperti internet. Untuk mendukung pembelajaran yang mengutamakan kemandirian siswa dalam menggali informasi keberadaan sarana informasi yang bersifat universal sangat dibutuhkan.

Keterbatasan fasilitas pendukung berakibat pada terbatasnya pelaksanaan sistem pembelajaran KBK sehingga sejauh ini sistem pembelajaran di SDN Klojen II Malang hanya bersifat semi KBK. Metode pembelajaran yang berbasis kompetensi masih terbatas pada penyusunan kurikulum belum sampai pada kegiatan praktis.

Kalaupun kegiatan belajar mengajar itu mencerminkan model KBK hanya sebatas pada pengertian siswa diberi kesempatan melakukan kegiatan mandiri dan itupun belum menyentuh pada semua materi pelajaran yang ada. Fasilitas yang ada juga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar KBK yang sepenuhnya.

Kendala keterbatasan sumber daya implementasi kebijakan KBK yang berakibat pada tidak maksimalnya implementasinya di lapangan merupakan kelemahan dari kebijakan yang dirumuskan secara *top-down*. Rumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak mampu mencapai kondisi sempurna di lapangan. Kebijakan *top-down* menggunakan *forward mapping* sehingga variabel-variabel yang ada di lapangan tidak dapat didefinisikan secara sempurna oleh *policy maker* di tingkat pusat karena tidak adanya pengamatan langsung mengenai kondisi riil di lapangan. Akibatnya hambatan-hambatan serta kebijakan-kebijakan teknis *implementor* di lapangan sering kali memunculkan dampak yang tidak terdefinisi pada proses perumusan kebijakan di tingkat pusat.

B. Dampak Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Pemilihan model pembelajaran berbasis kompetensi (KBK) digunakan sebagai alternatif pilihan bagi perubahan dunia pendidikan nasional. KBK dengan model pembelajaran berbasis holistik dianggap mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang semakin tertinggal dengan negara-negara lain.

Karakteristik KBK adalah adanya standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap lulusan lembaga pendidikan. Sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan dasar berperan dalam pembentukan pribadi siswa, terutama dengan digunakannya model KBK yang mengutamakan potensi dan kompetensi individu.

Selama dua tahun masa implementasinya, kebijakan KBK telah membawa perubahan-perubahan baik dalam manajemen sekolah maupun sistem pembelajaran di sekolah. Perubahan sistem pembelajaran tampak pada kegiatan belajar mengajar yang lebih berbasis kelas. Sistem belajar mengajar yang semula berbasis pada materi berubah menjadi berbasis kompetensi. Jika dahulu proses belajar berpusat pada guru sebagai sumber pengetahuan dengan berbasis kompetensi siswa diharuskan mandiri dalam menggali informasi.

Kegiatan belajar dalam kelas tidak lagi bersifat ceramah melainkan bersifat kerja kelompok untuk menggali informasi. Guru tidak lagi memberikan penilaian secara kelompok namun lebih mengarah pada individu, setiap individu siswa berhak memperoleh perhatian dalam mencapai kompetensi yang ditentukan. Hal ini tampak pada adanya standar nilai untuk setiap kompetensi serta program remedial bagi siswa yang belum mampu mencapai kompetensi yang ditargetkan. Melalui perubahan ini diharapkan pada masa mendatang lulusan lembaga pendidikan akan lebih menguasai pengetahuan dengan berdasar pada kemampuan individu mereka sendiri.

Perubahan manajemen sekolah tampak pada semakin dibutuhkannya partisipasi orang tua siswa dalam manajemen sekolah. Keberadaan Dewan Sekolah merupakan kebutuhan keterlibatan masyarakat sebagai mitra sejajar kepala sekolah dalam merumuskan kebijakan serta menyelesaikan masalah-masalah sekolah. Namun pada dasarnya pengertian mitra sejajar ini lebih cenderung pada konteks penyelesaian masalah-masalah keuangan yang sering kali dihadapi oleh pihak sekolah dalam kegiatan operasionalnya.

Kesadaran bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan yang sedang digalakkan oleh pemerintah nasional tidak dapat lepas dari peningkatan kualitas fasilitas pendidikan itu sendiri membuat pemerintah pusat meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN. Komitmen ini diwujudkan dalam pemberian bantuan dana operasional kepada sekolah yang diwujudkan dalam dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan ini juga bermaksud untuk membantu mengurangi tingginya biaya pendidikan bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah pusat ini didukung oleh pemerintah Kota Malang dengan mengeluarkan kebijakan mengenai penarikan sumbangan isidental bagi siswa baru yaitu menetapkan besarnya sumbangan yang boleh ditarik dari orang tua siswa bagi masing-masing sekolah. Namun pada kenyataannya kedua kebijakan ini dirasakan belum mampu membantu sekolah untuk menyediakan fasilitas belajar yang sesuai kebutuhan.

Kebijakan KBK dapat berjalan sempurna jika elemen-elemen implementasi tersedia di lapangan. Ketika elemen itu tidak terpenuhi maka kebijakan KBK tidak dapat berjalan sempurna bahkan akan memerlukan alternatif penyelesaian yang dapat berakibat pada dampak yang tidak diinginkan. Dalam konteks implementasi KBK, tujuan pembelajaran yang berbasis kompetensi akan tercapai jika sumber daya pendukung implementasinya, terutama masalah sumber dana pendidikan, dapat terpenuhi oleh sekolah yang bersangkutan. Namun ketika sumber daya implementasi itu tidak dapat terpenuhi maka manajemen sekolah akan mencari alternatif penyelesaian yang dapat digunakan sebagai jalan keluar dari masalah yaitu mencari sumber dana lain.

Pencarian sumber dana pendidikan pada akhirnya akan melibatkan peran serta masyarakat terutama orang tua siswa sebagai alternatif penyelesaiannya. Orang tua siswa sering kali harus membayar biaya pendidikan yang lebih mahal karena adanya kebijakan sekolah dalam usaha memenuhi kebutuhan fasilitas pembelajaran. Kebijakan sekolah dalam mencari sumber keuangan inilah yang merupakan bibit dari terjadinya komersialisasi pendidikan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran serta semua *implementor* kebijakan pendidikan. Lembaga sekolah memang merupakan *mini society* bagi siswa untuk membentuk dan mengembangkan potensi diri mereka. Melalui lembaga sekolah jugalah tujuan kebijakan peningkatan mutu pendidikan

dapat diwujudkan. Namun lembaga sekolah tidak dapat melaksanakan kebijakan pendidikan jika pemerintah sebagai *policy maker* tidak memberikan fasilitas pendukung bagi implementasi di lapangan. Karena keberadaan fasilitas sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan suatu kebijakan mencapai tujuannya.

Menurut teori *neo-liberalisme*, peran pemerintah yang semakin besar diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketika peran itu belum terlaksana dengan sempurna maka akan terjadi suatu dampak kebijakan yang belum terdefiniskan pada proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu selama pemerintah sebagai *policy maker* belum mampu menjadi fasilitator, yang terjadi adalah implementasi KBK akan menimbulkan dampak komersialisasi pendidikan sebagai akibat dari alternatif sekolah menyelesaikan masalah kebutuhan pembiayaan operasional dan penyediaan fasilitas belajar.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dan analisis implementasi kebijakan pendidikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada SDN Klojen II Malang menghasilkan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) memerlukan komitmen dan kerja sama dari para *implementor* kebijakan. Pemerintah sebagai *policy maker* berfungsi sebagai fasilitator implementasi kebijakan bagi *implementor* di lapangan. Sedangkan lembaga sekolah sebagai lembaga pelaksana, salah satunya adalah SDN Klojen II Malang merupakan target group untuk merealisasikan tujuan kebijakan.
2. Dalam proses implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan terdapat dua kemungkinan yang terjadi, yaitu kebijakan KBK dapat terimplementasi sempurna karena tersedianya fasilitas implementasi yang dibutuhkan atau terimplementasi (meskipun belum tersedia elemen pendukung implementasi) namun dengan beberapa alternatif kebijakan dari implementor untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kondisi yang terjadi pada SDN Klojen II Malang mencerminkan kemungkinan kedua, dimana

keterbatasan fasilitas belajar mengajar melahirkan beberapa alternatif penyelesaian, seperti pemberian tugas rumah pada beberapa tema pelajaran (khususnya berkaitan dengan kegiatan di luar sekolah) yang sulit dilakukan pada jam sekolah.

3. Untuk dapat mewujudkan tujuan peningkatan mutu pendidikan maka implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tingkat sekolah memerlukan fasilitas pendukung yang cukup besar. Ketika pemerintah belum mampu memenuhi fasilitas implementasi tersebut maka upaya-upaya yang diambil oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikannya akan mengarah pada terjadinya komersialisasi pendidikan. Hal ini terjadi karena adanya upaya sekolah untuk memaksimalkan peran serta orang tua siswa dalam membantu sekolah dalam hal sumber dana pendidikan.
4. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada SDN Klojen II Malang mencerminkan bahwa adanya keterbatasan fasilitas belajar mengajar menghambat perwujudan peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

1. Agar implementasi kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dapat berjalan lebih baik maka perlu diadakan pelatihan yang lebih intensif serta perlu diadakan uji kompetensi terhadap guru mengenai pemahaman terhadap model pembelajaran KBK. Alternatif ini dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan terhadap sekolah untuk melaksanakan KBK, pendampingan tersebut tidak hanya dari kalangan Dinas Pendidikan Kota Malang namun juga berasal dari kalangan akademisi dan teoritis.
2. Diperlukan kebijakan mengenai standar pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang lebih jelas. Khususnya standar mengenai kategori sekolah yang akan melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang meliputi kriteria guru, siswa, serta fasilitas belajar yang memenuhi kebutuhan belajar. Misalnya standar fasilitas laboratorium dan perpustakaan yang harus dimiliki oleh sekolah.
3. Monitoring intensif serta pendampingan dari pemerintah kota serta Dinas Pendidikan Kota Malang tidak lagi bersifat tekanan tapi lebih sebagai fasilitator serta pembimbing sekolah dalam melaksanakan kurikulum Berbasis Kompetensi

(KBK) serta mencapai tujuan yang dicita-citakan. Peran itu dapat diwujudkan dengan membantu sekolah untuk memaksimalkan fasilitas untuk kebutuhan belajar tanpa harus mencampuri perumusan kebijakan dalam lingkup sekolah.

4. Perlu ditetapkan suatu model evaluasi belajar yang tidak lagi hanya berdasarkan tes tulis. Untuk tes jenjang pendidikan yang lebih tinggi tes dapat dilakukan dengan mengadakan ujian yang berbasis kegiatan praktis yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, misalnya ujian langsung dilaksanakan di laboratorium, ujian ketrampilan, seni dan pengetahuan siswa.
5. Manajemen sekolah harus lebih bijaksana dalam menyikapi kebijakan otonomi sekolah, jangan sampai prinsip kemandirian serta kebijakan yang diambil sekolah justru menyengsarakan masyarakat. Hal ini terutama berkaitan dengan kebijakan keuangan yang semakin membutuhkan peran serta orang tua siswa. Oleh karena itu maka dalam perumusan kebijakan peran orang tua siswa perlu ditingkatkan lagi, misalnya dengan menyebar angket atau poling untuk mengetahui pendapat orang tua siswa terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh sekolah. Langkah ini juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan sekolah yang telah diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Ketentuan Umum Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Miles, B. Matthew dan Hubberman A. Michael. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Usman. 1988. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyasa, Encho. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 1989. *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nurhadi. 2004. *Kurikulum 2004: Pertanyaan dan Jawaban*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. *Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)*. 2002. Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.

Rodee, Carlton Clymer, dkk. 1997. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soetopo, Hendayat, Soemanto, Wasty. 1991. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum: Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang: Indonesiatera.

Tim Pembina Mata Kuliah. 2001. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Puslitabmas Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Wahab, Solichin, Abdul. 1997. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Solichin, Abdul. 1999. *Analisa Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Edisi 2. Malang: PT. Danar Wijaya-Brawijaya University Press

Undang-Undang

Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Jurnal

Hill, Dave. 2003. *Journal for Critical Education Policy Studies Volume 1*.

Papponetti, Valeria. 2000. *Journal: Scientific Advice to Public Policy-making*.

Mayo, Peter. 2005. *Journal for Critical Education Policy Studies Volume 3*

Smith, Stacy. 2005. *Journal of Maine Education: Politics in Education: Problems, Paradoxes, and Possibilities, Volume XXI.*

Artikel

Cristianto, Arif, Budi. *Kurikulum Berbasis Kompetensi yang Membingungkan.* Artikel. Suara Pembaharuan, 17 Januari 2003.

Mosah, Ahmad, Fanani. *Dari CBSA ke KBK Bidang Agama.* Artikel. Kompas, 2 Desember 2005.

Yuniarsih, Tjutju. *Model Pendidikan Kolaboratif sebagai Upaya Strategis meningkatkan Mutu Lulusan yang Kompetitif.* Artikel. Suara Pembaharuan, 16 September 2005.

Sesuaikan Potensi Daerah: Pembiayaan Rehabilitasi Sekolah Bisa Fleksibel. Artikel. Kompas, 1 Februari 2006.

Bangun Sekolah Kejuruan: Perlu Solusi Alternatif Untuk Pembuktian akan Manfaat Pendidikan. Artikel. Kompas, 2 Februari 2006.

Pelaksanaan KBK Dihadang Banyak Kendala: Keterbatasan Sarana Pendidikan Jadi Masalah Serius. Artikel. Kompas, 4 Februari 2006.

Situs

www.suara-pembaharuan.com/news/2005/06/09/Editor/edit02.htm, 9 Juni 2005.

Artikel Menarik Tentang Dunia Pendidikan.

www.suara-pembaharuan.com, 3 Februari 2005. *Kurikulum Berbasis Kompetensi.*